



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
ANTARWARGA DI KECAMATAN JOHAR BARU, JAKARTA PUSAT**

TESIS

**RAESA OKTAVIA
NIM: 120170303022**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**BOGOR
Februari2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Raesa Oktavia
NIM : 12017.0303.022
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul : **Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat**

Tesis dengan judul dan nama mahasiswa tersebut di atas telah disetujui untuk dapat diseminarkan sebagai bagian persyaratan untuk melaksanakan penelitian pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I :

Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gede Sumertha KY., Psc., M.Sc (.....)

Pembimbing II :

Brigjen Dr. Eri. R. Hidayat, MBA., MHRMC (.....)

Bogor,

A.n Dekan Fakultas Kemanan Nasional
Sesprodi Damai dan Resolusi Konflik

Kolonel Inf Dr. Bambang Wahyudi, MM. M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Raesa Oktavia
NIM : 12017.0303.022
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul : **Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat**

Telah berhasil diseminarkan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. I Gede Sumertha KY, Psc., M.Sc (.....)
Pembimbing II: Dr. Eri. R. Hidayat, MBA., MHRMC (.....)
Penguji I : Dr. Surryanto DW, MH,, MM (.....)
Penguji II : Dr. Priza Audearmando Purba, M.Si (.....)
Penguji III : Moch. Rofiq, S.Pd., M.Si (Han) (.....)

Bogor,

A.n Dekan Fakultas Kemanan Nasional
Sesprodi Damai dan Resolusi Konflik

Kolonel Inf Dr. Bambang Wahyudi, MM. M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019

Raesa Oktavia

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Raesa Oktavia
NPM : 120170303022
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas :Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019

Raesa Oktavia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat serta rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Tiada kata lain yang dapat penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillahirabbil’alamin”, karena atas karunia-Nya lah akhirnya penyusunan tesis dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat”** dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Pertahanan dan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Dalam proses penulisan tesis ini, telah banyak pihak yang berkontribusi dalam memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya karya tulis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Dr.Tri Legionosuko, S.IP, MAP, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Bela Negara, Universitas Pertahanan.
2. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T. M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional yang telah memberikan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Mayjen TNI (Purn) Dr. I Gede Sumertha KY., Psc., M.Sc selaku pembimbing I yang telah senantiasa memberikan bimbingan dan masukan yang berarti kepada penulis agar tesis ini dapat terselesaikan.

4. Brigjen TNI Dr. Eri. R. Hidayat, MBA., MHRMC selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam mengarahkan serta memberikan bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis hingga akhirnya tesis ini selesai disusun.
5. Kolonel Infanteri Dr. Bambang Wahyudi, M.Si, M.M selaku Sekretaris Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, yang tanpa kenal lelah memberikan semangat, motivasi dan bantuan yang sangat berarti kepada penulis. Hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
6. Para Dewan Penguji Dr. Surryanto DW, MH., MM, Dr. Priza Audearmando Purba, M.Si, Moch. Rofiq, S.Pd., M.Si (Han) yang telah memberikan masukan kepada penulis agar tesis ini menjadi lebih baik sehingga layak untuk dipublikasikan.
7. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada putri tercintanya untuk menyelesaikan studi dan tesisnya di Kampus Universitas Pertahanan. Serta Kakak, Abang dan Adik yang selalu mendukung.
8. Dr. Ihsan Malik, M.Si selaku dosen dan pakar dalam Studi Damai dan Resolusi Konflik yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis mulai dari penulisan proposal penelitian hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh pengajar beserta staf di Fakultas Keamanan Nasional, dan staf Program Studi Damai dan Resolusi Konflik yang telah banyak membantu penulis selama proses belajar dan penulisan tesis ini.
10. Sahabat terbaik Rahmi Yulia yang selalu menjadi pendengar dan selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam segala hal. Serta adek Nurulia 'Uyikk' Unggul Putri Ragil dan juga Lia Safitri.

11. Bambang Prasajo Wicaksono, yang telah membuat waktu-waktu perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna dan selalu memberi semangat dan bantuan kepada penulis.
12. Rekan-rekan di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik angkatan VI, terima kasih atas satu tahun yang bermakna di Universitas Pertahanan bersama kalian di Prodi Damai dan Resolusi Konflik, semoga silaturahmi ini akan tetap terjaga selamanya.
13. Rekan diskusi dalam berbagai hal dan situasi: Letkol Kav. Yusuf Candra Negara, Bang Ahmad Wafi Fauzi, Khoirul Hasan, Zensa Hidayatulrahman, Galang Nafiandi, Eman Sukmana, Mei Pritangguh, Alfian Rizanurrasa, Pak Asror Mukti Adi, Al-Ustadz Akbar Kurniadi.
14. Dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, masukan, serta dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Pertahanan maupun dalam penyusunan hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam tesis ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pertahanan serta studi damai dan resolusi konflik dan bermanfaat bagi proses penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Bogor, Februari 2019

Raesa Oktavia

ABSTRAK

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru

RAESA OKTAVIA

Angka kepadatan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sementara tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Wilayah dengan angka kepadatan penduduk yang tinggi disertai dengan besarnya angka pengangguran dapat memunculkan berbagai potensi kerawanan, salah satunya adalah konflik sosial. Kecamatan Johar Baru yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Lingkungan hidup yang kurang sehat di wilayah ini, kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, dan rusaknya pergaulan banyak anak-anak muda di wilayah ini merupakan faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik tawuran antarwarga yang selalu hanya dikarenakan hal-hal yang sepele dan tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori peran, teori identitas sosial, teori konflik, dan teori resolusi konflik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih perlu ada optimalisasi peran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah DKI Jakarta, kepadatan penduduk, konflik sosial, tawuran, Johar Baru.

ABSTRACT

Government Role on the Conflict Resolution among residents in Johar Baru District, Central Jakarta

RAESA OKTAVIA

Population density that continues to increase from year to year without being accommodated by the availability of employment causes high numbers of unemployment. High unemployment will create a variety of potential vulnerabilities, especially social conflicts. Johar Baru sub-district located in Central Jakarta is one of the regions with a very high population density number. The unhealthy environment in this region, the population density, low education level, high unemployment, and the bad behaviour of the teenagers in this region are the factors that trigger the occurrence of conflict such as brawl between residents. This study aims to analyze the role of the government in resolving conflicts among residents in Johar Baru District, Central Jakarta. This research is a qualitative research using the role theory, social identity theory, conflict theory, and conflict resolution theory. The results of this study indicate that there is still a need to optimize the role of the DKI Jakarta Provincial Government.

Keywords: Role, DKI Jakarta Government, population density, social conflict, brawl, Johar Baru.

DAFTAR ISI

UNIVERSITAS PERTAHANAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	9
1.2.1 Fokus Penelitian.....	10
1.2.2 Subfokus Penelitian.....	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.5.2 Manfaat Praktis	11
BAB 2 KAJIAN TEORITIK.....	13
2.1 Deskripsi Konseptual	13
2.1.1 Teori Peran	13

2.1.2	Teori Identitas Sosial.....	17
2.1.3	Teori Konflik	20
2.1.4	Teori Resolusi Konflik.....	24
2.1.5	Konsep Keamanan Nasional.....	26
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	28
2.3	Kerangka Pemikiran	33
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	36
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.1.1	Tempat Penelitian	36
3.1.2	Waktu Penelitian	37
3.2	Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian.....	38
3.2.1	Sumber Data	38
3.2.2	Subjek Penelitian.....	38
3.2.3	Objek Penelitian	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4	Pemeriksaan Keabsahan Data	43
3.5	Teknik Analisis Data	44
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	46
4.1.1	Gambaran Geografis dan Demografis.....	46
4.2	Hasil Penelitian	49
4.2.1	Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Johar Baru.....	49
4.2.2	Rangkaian Peristiwa Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru	52
4.2.3	Struktur Konflik dan Penyebab Konflik di Kecamatan Johar Baru	61
4.3	Pembahasan.....	64

4.3.1 Analisis Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru..	64
4.3.2 Analisis Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penyelesaian dan Pencegahan Konflik di Kecamatan Johar Baru	70
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	87
LAMPIRAN 1. SURAT PENELITIAN.....	88
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA	89
LAMPIRAN 3. CATATAN HASIL WAWANCARA.....	99
LAMPIRAN 4. LAMPIRAN FOTO	107
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Johar Baru	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kelurahan	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI	3
Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu yang Relevan	29
Tabel 3.1 Tabel Rencana Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Johar Baru	47
Tabel 4.2 Sepuluh Kelurahan dengan IPKS Tertinggi di Provinsi DKI Jakarta	48

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi masyarakat dari berbagai kota di luar Provinsi DKI Jakarta. Tingginya peluang pekerjaan dengan gaji yang tinggi, pendidikan yang lebih baik, dan juga fasilitas-fasilitas yang lengkap dan mudah diakses membuat Jakarta semakin menjadi salah satu kota tujuan bagi para pencari kerja yang tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berpengaruh pada kepadatan penduduk Jakarta yang sangat tinggi. Banyaknya penduduk yang datang dari luar daerah Jakarta untuk bekerja serta adanya kenaikan dalam angka pertumbuhan penduduk setiap tahun menjadikan jumlah populasi yang ada di Jakarta melampaui daya dukung perkotaan.

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)¹ yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)², terdapat peningkatan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2016 sebesar 1.09 persen atau sekitar 111.402 jiwa. Dan pada tahun 2016 berjumlah 10.25 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta telah terjadi sejak tahun 1990an, namun tidak sebesar peningkatan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta *circa* 1980-1990an, sebelum ada kebijakan dari pemerintah dalam mengembangkan daerah penyangga wilayah pusat

¹ Susenas atau Survey Sosial Ekonomi Nasional merupakan salah satu survey tahunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

² Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(Jakarta) seperti pengembangan daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang mulai diupayakan oleh pemerintah sejak tahun 1990an.

Berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk, Provinsi DKI Jakarta juga mengalami peningkatan dalam angka kepadatan penduduk. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 15.480 jiwa/km².³ Ada ketimpangan yang cukup tinggi antara kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan kepadatan penduduk di provinsi lain di Indonesia.

Jumlah kepadatan penduduk yang meningkat dan tingginya angka pengangguran dapat memunculkan berbagai potensi kerawanan, khususnya konflik sosial. Kerentanan akan terjadinya konflik sosial tidak dapat diabaikan begitu saja. Eskalasi dan intensitas konflik sosial yang tinggi dapat mempengaruhi keamanan nasional. Kerugian harta benda dan bahkan nyawa dapat menjadi akibat dari konflik sosial dengan kekerasan di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah wilayah kotamadya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat merupakan daerah strategis di Jakarta yang memiliki berbagai kelebihan dalam aspek ekonomi dan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, laju pertumbuhan ekonomi daerah Jakarta Pusat tertinggi apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Terletak di jantung Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat terus mengalami pertumbuhan dalam ruang bisnis, rekreasi dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan infrastruktur, perhotelan, perkantoran dan sebagainya. Bahkan, simbol pusat kota sendiri terletak di daerah Jakarta Pusat, yaitu

³ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta*, 2015, dalam <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/138/distribusi-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html>, diakses pada 2 Agustus 2018.

Monumen Nasional (Monas), serta Lingkaran (Bundaran) Hotel Indonesia yang sering menjadi tempat dan/atau simbol berlangsungnya demonstrasi skala nasional.

Tabel 1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI

Kabupaten/Kota		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1		2	3
1	Kepulauan Seribu	0,23	2 683,96
2	Jakarta Selatan	21,48	15 472,17
3	Jakarta Timur	27,94	15 124,15
4	Jakarta Pusat	8,98	18 993,11
5	Jakarta Barat	24,20	19 017,92
6	Jakarta Utara	17,17	11 913,83
DKI Jakarta		100,00	15 366,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta,2015

Menurut data Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, wilayah Jakarta Pusat merupakan wilayah terpadat kedua setelah Jakarta Barat, yaitu dengan kepadatan penduduk 18.993 jiwa/km².

Salah satu kawasan padat penduduk di kotamadya Jakarta Pusat yaitu Kecamatan Johar Baru. Secara administratif, Kecamatan Johar Baru merupakan salah satu kecamatan yang masuk ke dalam wilayah kota administratif Jakarta Pusat. Kemudian, secara administratif Kecamatan Johar

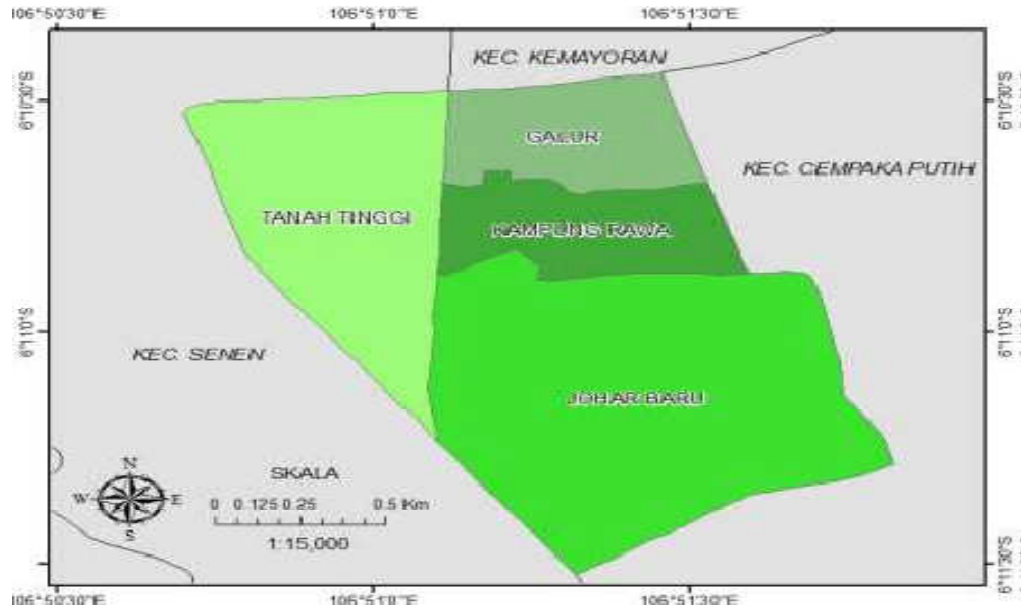
Baru terbagi dalam empat kelurahan yaitu Kelurahan Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi dan Galur. Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, merupakan salah satu daerah dengan Indeks Potensi Kerawanan Sosial⁴ yang tinggi di DKI Jakarta.

Kerawanan sosial sendiri merupakan dampak dari adanya gangguan dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan sosial. Ketahanan sosial bersifat multidimensi, yang mencakup aspek sosial budaya, hukum dan politik, lingkungan dan prasarana fisik, keamanan dan ketertiban, serta perekonomian. Kerawanan sosial dapat dimaknai sebagai suatu keadaan bahaya/sulit/tidak aman/adanya gangguan/kerusakan lingkungan hidup dan perilaku menyimpang di sekelompok komunitas/masyarakat yang disebabkan oleh tekanan dan resiko baik yang datang dari dalam wilayah tersebut maupun dari luar wilayah. Apabila di suatu wilayah nilai kerawanan sosialnya rendah, maka dapat diasumsikan kondisi ketahanan sosialnya baik, begitu juga sebaliknya. Apabila di suatu wilayah nilai kerawanan sosialnya tinggi, maka ada indikasi bahwa kondisi ketahanan sosial di wilayah tersebut tidak baik.

Untuk persentase luas wilayah menurut kelurahan, Kelurahan Johar Baru merupakan Kelurahan dengan wilayah terluas yaitu 50,21% dari luas wilayah Kecamatan Johar Baru, diikuti dengan Kelurahan Tanah Tinggi dengan persentase 26,16%, kemudian Kelurahan Kampung Rawa dengan persentase 12,66% dan terakhir Kelurahan Galur dengan persentase luas wilayah 10,97% dari luas wilayah Kecamatan Johar Baru.⁵

⁴ Indeks Potensi Kerawanan Sosial adalah suatu alat untuk mengukur, memantau dan memonitor perkembangan kerawanan sosial di suatu wilayah pada periode tertentu. IPKS adalah suatu angka indeks komposit (gabungan dari berbagai angka indeks) yang menggambarkan tingkat kerawanan sosial suatu wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.

⁵ BPS Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Kecamatan Johar Baru dalam Angka*. (Jakarta, 2017) dalam <https://jakpuskota.bps.go.id/publication/2017/09/28/e8133509df42efe590ae908a/kecamatan-johar-baru-dalam-angka-2017.html>, diakses pada 2 Agustus 2018.



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Johar Baru

Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Johar Baru berjumlah 144.033 jiwa. Kelurahan Tanah Tinggi memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 47.667 jiwa. Diikuti dengan Kelurahan Johar Baru dengan jumlah penduduk 45.734 jiwa, kemudian Kelurahan Kampung Rawa dengan jumlah penduduk 27.399 jiwa, dan terakhir Kelurahan Galur dengan jumlah penduduk 23.233 jiwa.⁶

Dengan angka kepadatan penduduk yang tinggi, lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat dikarenakan terlalu sempit, konflik antarwarga sangat kerap terjadi. Tawuran antar kelompok masyarakat sering terjadi tanpa sebab dan alasan yang jelas. Konflik antar kelompok yang terjadi di wilayah ini berlangsung tidak mengenal waktu, dapat terjadi sewaktu-waktu. Seperti tawuran yang terjadi pada hari Selasa (2 Januari 2018) di jalan Rawa

⁶ Data Pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017,

Sawah antara dua kelompok warga di Johar Baru.⁷ Tidak ada penyebab yang pasti yang menjadi faktor pecahnya tawuran antar kelompok warga di wilayah ini, hanya kesalahpahaman yang menjadi besar karena ada provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tawuran yang terjadi baru dapat berhenti setelah adanya penembakan gas air mata oleh petugas kepolisian.

Tawuran yang terjadi di wilayah Johar Baru dapat yang tidak kenal waktu ini bahkan juga terjadi pada saat perayaan hari besar Idul Adha pada Jum'at (1 September 2017). Hari yang seharusnya menjadi hari suci bagi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadi penghambat bagi kelompok warga yang melakukan aksi kekerasan di antara mereka. Pada tawuran yang terjadi di Jalan Rawa Selatan II, Gang Buntu, RW 07 Kecamatan Johar Baru ini terdapat 10 (sepuluh) tersangka yang ditangkap oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat.⁸ Pada tawuran yang terjadi antara warga RW 04 Kampung Rawa (warga *Lepoy*) dengan warga RW 07 Gang Buntu Kampung Rawa ini, terdapat provokator yang mengawali tawuran dengan aksi lempar genteng yang berlanjut pada aksi kekerasan antar kedua kelompok warga tersebut.

Tawuran yang terjadi di wilayah Johar Baru ini didominasi oleh tawuran antar Geng. Geng merupakan sebuah asosiasi diri yang dibentuk dari individu-individu yang disatukan oleh kepentingan bersama yang memiliki pemimpin dan organisasi internal yang bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Masing-masing kelompok masyarakat di

⁷ Kompas TV, *Lagi-lagi, Tawuran Antar Dua Kelompok di Johar Baru*, dalam <https://www.kompas.tv/content/article/18149/video/berita-kompas-tv/lagi-lagi-tawuran-antar-2-kelompok-di-johar-baru> diakses pada 1 September 2018

⁸ Tempo, *Tawuran Antarwarga di Johar Baru, 10 Orang Tersangka Ditangkap*, dalam <https://metro.tempo.co/read/905615/tawuran-antarwarga-di-johar-baru-10-orang-tersangka-ditangkap/full&view=ok> diakses pada 2 September 2018

⁹ W. B. Miller, *Crime by Youth Gangs and Groups in the United States. Report to The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, National Institute for Juvenile Justice and Delinquency Prevention*, Washington DC, US Department of Justice, 1982, (hlm. 16) dalam <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cyggus.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2018.

Johar Baru memiliki sebuah Geng sendiri yang terbentuk dari rasa solidaritas sosial yang kuat di antara anggota kelompok.

Banyak tawuran yang terjadi karena hal sepele diawali dengan saling ejek-mengejek antar individu, yang kemudian berujung pada tawuran antar geng masing-masing. Fenomena ini sesuai dengan Teori Identitas Sosial. Teori Identitas Sosial merupakan bagian dari diri seseorang di mana ia merasa bagian dari suatu kelompok yang memiliki kesamaan rasa emosional, adanya keterlibatan, dan merasa bangga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tajfel menyebut fenomena ini sebagai bagian dari diri seseorang yang merasa bangga dan peduli dari keanggotaannya terhadap suatu kelompok tertentu yang menurut pengetahuan dan signifikansi emosionalnya sama dengan keanggotaan di kelompok tersebut.¹⁰

Tawuran yang terjadi antar geng di Kecamatan Johar Baru ini telah berlangsung sejak lama, sangat sering terjadi dan terdapat beberapa titik yang menjadi “arena” tawuran antar Geng. Akibatnya warga setempat merasaterganggu rasa keamanan kemanusiaannya,tetapi di sisi lain warga tidak berdaya untukmencegah, dan merasa tidak terlindungikeselamatan dalam bidang ekonomi, pribadi,dan lingkungan.

Konflik merupakan situasi ketidaksepahaman yang melibatkan pihak-pihak karena merasa terancam dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Eskalasi konflik umumnya diawali dengan adanya ketegangan-ketegangan antara beberapa pihak, meningkat menjadi krisis, muncul kekerasan terbatas, dan berpuncak pada terjadinya kekerasan massal.¹¹Konflik memberikan implikasi yang negatif terhadap keamanan nasional. Apabila pemerintah daerah tidak dapat menangani konflik dalam skala kecil dalam suatu komunitas di suatu wilayah, maka pemerintah akan

¹⁰ Henri Tajfel, *Social Psychology of Intergroup Relations*. (Annual reviews, 1982) dalam <http://web.comhem.se/u52239948/08/tajfel86.pdf> diakses pada 14 Agustus 2018.

¹¹ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), hlm. 9

kesulitan dalam menangani konflik dalam skala yang lebih besar. Apabila pemerintah melakukan pembiaran pada konflik-konflik skala kecil, hal tersebut dapat menjadi pemicu munculnya konflik-konflik serupa di wilayah yang berbeda. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan rasa tidak aman kepada masyarakat dan menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), di mana keamanan nasional merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial¹², telah disebutkan bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional.

Beberapa upaya yang sudah pernah dilakukan untuk menangani konflik sosial di Kecamatan Johar Baru meliputi: penanganan konflik dengan pendekatan keamanan oleh Kepolisian Sektor Johar Baru, penanganan konflik dengan pendekatan sosial oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dosen, masyarakat peduli, dan dunia usaha. Dalam pendekatan ekonomi, upaya yang telah dilakukan yaitu dengan kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam bentuk pelatihan menjahit, sablon, perbaikan *Air Conditioner* dan *handphones* sedangkan dalam pendekatan Pekerjaan Sosial, Kementerian Sosial RI dengan Program Kereserian Sosial yang diarahkan pada terciptanya rasa kebersamaan dengan kegiatan gotong royong, membuat taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan WC umum, pemagaran taman dan berbagai upaya lainnya.

¹² Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1 Ayat 1.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah mengupayakan pemasangan CCTV (*closed circuit television*) atau kamera pengintai di kawasan Johar Baru untuk mempermudah pihak yang berwajib dalam mengantisipasi aksi tawuran yang sangat sering terjadi di kawasan Johar Baru.¹³ Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menentukan titik-titik letak pemasangan CCTV atau kamera pengintai yang kerap dijadikan “arena” tawuran oleh Geng-Geng di Kawasan Johar Baru.

Fenomena konflik sosial yang tidak kunjung berhenti di Johar Baru tersebut menarik untuk diteliti dalam upaya untuk menjelaskan, mengapa rekonsiliasi konflik sosial tidak dapat diwujudkan secara permanen dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan konflik sosial yang selalu terjadi di wilayah tersebut. Sehubungan dengan itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konflik sosial antar kelompok masyarakat, dan bagaimana peranan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Johar Baru?

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang memuat pokok masalah bersifat umum. Subfokus penelitian merupakan sudut tinjauan dari permasalahan pokok yang ada dalam fokus penelitian. Berdasarkan latar belakan konflik sosial yang terjadi antar warga di Kecamatan Johar Baru, dan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelesaian konflik tersebut, maka disusunlah fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut:

¹³ Berita Jakarta, *Antisipasi Tawuran, DKI Pasang 13 CCTV di Johar Baru*, dalam http://www.beritajakarta.id/read/13430/Antisipasi_Tawuran_DKI_Pasang_13_CCTV_di_Johar_Baru#.W-bu5ZMzY2z diakses pada 3 September 2018

1.2.1 Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian lebih fokus dan sistematis maka pada pokok pembahasan yang menjadi topik penulisan tesis akan diuraikan menjadi pokok-pokok bahasan dengan perumusan dan fokus masalah. Peneliti fokus terhadap Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam Resolusi Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.2.2 Subfokus Penelitian

Adapun beberapa subfokus penelitian yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru.
2. Peranan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah yang akan diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Peran Pemerintah Daerah dalam Resolusi Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat”.

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakonflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?
2. Bagaimana peranan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana konflik antarwargayang terjadi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dan bagaimana peranan pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dalam menyelesaikan konflik antarwarga yang terjadi di Kecamatan Johar Baru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian yang dapat digunakan untuk kepentingan di masa yang akan datang, yang dapat berupa pengembangan program ataupun kemajuan ilmu pengetahuan secara umum. Adapun manfaat dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam penerapan teori-teori ilmu Damai dan Resolusi konflik, dan juga ilmu pengetahuan keamanan nasional yang telah dipelajari pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai upaya resolusi konflik dan pencapaian *positive peace* dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga keamanan nasional.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pertahanan di Indonesia. Ilmu Pertahanan merupakan ilmu yang selalu berkembang dalam menghadapi lingkungan strategis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan Damai dan Resolusi Konflik serta Ilmu Pertahanan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta lembaga/instansi

terkait mengenai penyelesaian konflik antarwarga yang ada di Kecamatan Johar Baru agar tercapainya perdamaian di wilayah ini secara berkelanjutan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada dinas sosial terkait mengenai pemberian pelatihan keterampilan kepada para masyarakat di wilayah Kecamatan Johar baru beserta kebijakannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif solusi penyelesaian konflik serupa yang terjadi di wilayah lain dalam rangka untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

BAB 2 KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian teoritik dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan rencana penelitian khususnya konflik sosial yang terjadi antar masyarakat. Teori dibutuhkan untuk menganalisis penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori dan konsep yang meliputi:

2.1.1 Teori Peran

Peran merupakan laku, bertindak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam

pengertian sederhana, peran dari seorang guru adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.¹⁴

Menurut Syaiful Bahri Djamarah,¹⁵ Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimasjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran guru adalah perangkat tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala dia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya.

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang memadukan teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Menurut Sarwono dalam Gartiria Hutami¹⁶, teori peran berawal dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Istilah peran sendiri diambil dari dunia teater. Di mana dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang karakter tertentu dan harus memposisikan dirinya sebagai karakter tersebut dengan berperilaku sesuai dengan karakter yang dimainkan. Posisi aktor dalam teater ini adalah analogi perilaku seorang individu dalam masyarakat. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.¹⁷

Dalam Teori Peran, terdapat pemahaman bersama bahwa harapan-harapan peran merupakan hal yang membuat individu untuk berperilaku

¹⁴ Suwari Akhmaddhian. 2013. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan) Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No 3, September. Hal. 449

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Gartiria Hutami & Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*, hlm.3

¹⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm. 73

dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang memiliki peran tertentu, misalnya dokter, dosen, mahasiswa, orang tua, dan sebagainya, diharapkan agar berperilaku sesuai dengan peran yang dimiliki tersebut. Misalnya seorang yang mempunyai peran sebagai seorang dokter, maka ia mengobati orang lain, dalam hal ini pasien. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya.¹⁸

Poerwadarminta mengemukakan bahwa Peran merupakan “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁹

Pada hakikatnya peran dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan atau profesi tertentu. Kepribadian pada seseorang juga menjadi faktor pengaruh bagaimana berjalannya peran tersebut. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Syarat-syarat peran meliputi tiga hal, yaitu:

1. Peran harus meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁸*Ibid.*, hlm.5

¹⁹Suwari Akhmaddhian. 2013. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 TAHUN 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 3 September. Hlm. 450.

2. Peran harus sesuai dengan konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Peran dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.
3. Peran merupakan sebuah rangkaian yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau profesi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok ini akan terjadi interaksi antara anggota dari suatu kelompok masyarakat dengan anggota dari kelompok masyarakat lainnya. Dalam interaksi ini kemudian memunculkan ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat muncullah apa yang dinamakan dengan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang yang bersangkutan telah menjalankan suatu peranan.

Kahn (2004) seperti yang dikutip oleh Gartiria Hutami, menjelaskan tentang teori peran dalam konteks perilaku organisasi. Ia menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai peran mereka. Jika sering terjadi perubahan terhadap lingkungan organisasi akan memunculkan rasa yang tidak aman. Harapan itu antara lain meliputi norma-norma atau tekanan-tekanan agar bertindak dalam cara dan kondisi tertentu. Tiap-tiap individu akan bertindak, menginterpretasikan, dan merespon dengan berbagai cara. Kahn juga menyatakan bahwa tiap individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri individu tersebut. Konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.

Peneliti menggunakan Teori Peran dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peranan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam penyelesaian konflik di Johar Baru.

2.1.2 Teori Identitas Sosial

Secara epistemologi, kata identitas berasal dari kata *identity*, yang berarti:

- a. Kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama lain;
- b. Kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama di antara dua orang atau dua benda;
- c. Kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama di antara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda;
- d. Pada tataran teknis, pengertian epistemologi di atas hanya sekedar menunjukkan tentang suatu kebiasaan untuk memahami identitas dengan kata “identik”, misalnya menyatakan bahwa “sesuatu” itu mirip satu dengan yang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata identitas dan kata sosial sebagai berikut : identitas adalah: ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri”. Sedangkan kata “sosial” didefinisikan sebagai yang “berkenaan dengan masyarakat”.

Menurut Hogg dan Abrams (1988) dalam Mangun dan Block Jr, identitas sosial adalah suatu keyakinan individu bahwa ia adalah anggota

dari kelompok sosial tertentu dan keyakinan itu berasal dari perbandingan antara anggota kelompok yang dipilih dan kelompok lain.²⁰

Teori Identitas Sosial secara khusus adalah bagian dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada identifikasinya dengan sebuah kelompok, baik itu kelompok agama, etnis, gender ataupun afiliasi sosial lainnya. Identitas sosial sangat penting karena memunculkan perasaan bahwa seorang individu memiliki tempat dan kedudukan dalam dunia. Pada umumnya, setiap manusia akan mengklasifikasikan dirinya dalam suatu entitas kelompok tertentu untuk merepresentasikan identitas dirinya. Hal ini dilakukan atas dasar unsur kesamaan tertentu yang terdapat pada individu lainnya.

Sesuai dengan teori identitas sosial menurut Tajfel²¹, *social identity* (identitas sosial) merupakan bagian dari diri seseorang yang merasa bangga dan peduli dari keanggotaannya terhadap suatu kelompok tertentu yang menurut pengetahuan dan signifikansi emosionalnya sama dengan keanggotaan di kelompok tersebut.

Teori identitas sosial merupakan suatu teori dalam psikologi sosial tentang hubungan antarkelompok, proses kelompok, dan diri sosial. Teori identitas sosial menjelaskan bagaimana orang memandang diri mereka sebagai anggota tertentu kelompok sosial dan bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi opini (Tajfel 1978; Tajfel dan Turner 1986). Teori ini mencakup tiga komponen utama yaitu kategorisasi, identifikasi, dan komparasi. Teori identitas sosial mengusulkan bahwa orang menempatkan diri dalam kategori atau kelompok. Menurut teori ini seseorang secara

²⁰Maruice Mangum dan Aray Block Jr, "Social Identity Theory and Public Opinion towards Immigration", *Social Science*, 2018, Vol. 7, Iss.3, hlm. 3.

²¹ Henri Tajfel, *Social Psychology of Intergroup Relations*. Annual reviews. 1982. dalam <http://web.comhem.se/u52239948/08/tajfel86.pdf> diakses pada 14 Agustus 2018.

otomatis terlibat dalam pengkategorisasi diri (Turner et al. 1987). Artinya, wajar bagi orang untuk berpikir dalam istilah kelompok, menempatkan diri dalam kelompok sosial dan percaya pada aspek-aspek positif dari kelompok itu. Proses kategorisasi diri ini bersamaan dengan identifikasi (keanggotaan dalam suatu kelompok atau afinitas yang dimiliki individu untuk satu kelompok di atas yang lain). Identifikasi merupakan keterikatan psikologis yang tidak berbeda dengan identifikasi kelompok dan, juga seperti identifikasi kelompok, itu tidak memerlukan prosedur formal untuk mendapatkan masuk ke dalam kelompok (Green dan Green 1999). Kelompok sosial tempat individu menempatkan diri adalah kelompok dan kelompok lain adalah kelompok luar. Selanjutnya, orang terlibat dalam perbandingan sosial, mengamati perbedaan antara kelompok mereka dan kelompok luar. Merupakan hal yang alami bagi orang untuk berpikir lebih positif tentang kelompok dan lebih negatif dari kelompok keluar. Anggota dalam kelompok menciptakan identitas diri yang positif (Tajfel 1981). Sebagai anggota di dalam kelompok, mereka mendapati bahwa kelompok mereka lebih dihargai, terutama mengenai saingan di luar kelompok. Sebagai hasilnya, orang-orang menciptakan kesenjangan yang menguntungkan antara kelompok yang disukai dan kelompok yang tidak disukai.

Social identity berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu serta rasa solidaritas yang mendalam. Dalam keanggotaan warga Johar Baru di kelompok/geng mereka masing-masing, timbul rasa solidaritas yang tinggi kepada sesama anggota kelompok. Apabila seorang anggota kelompok A memiliki masalah atau cekcok dengan individu atau geng lainnya, maka anggota lain di kelompok A akan ikut membantu dan/atau menyerang geng lain tersebut.

Pada umumnya seorang individu pada saat yang bersamaan merupakan anggota dari berbagai kategori dan kelompok sosial tergantung pada kebutuhan ataupun keinginannya, sehingga individu-individu akan membagi dunia sosial kedalam dua kategori yang berbeda yaitu kita (*in group*) dan mereka (*out group*). Pengkategorian inilah yang kemudian menjadi prasangka (*prejudice*) bahwa 'kita' benar dan 'mereka' salah. Peneliti menggunakan Teori Identitas Sosial ini untuk menganalisis sikap dan perilaku para anggota kelompok yang sering terlibat konflik di Kecamatan Johar Baru.

2.1.3 Teori Konflik

Teori konflik yang secara fungsional ini dapat menjadi saluran memahami konflik dalam tataran mikro, dengan individu, dan struktur jaringan sosial yang biasanya menjadi unit kajian konflik melalui pendekatan teori perilaku. Dalam upaya pengembangan teori konflik yang fungsional dan didekati melalui pendekatan teori perilaku disebutkan bahwa konflik terjadi akibat bias persepsi di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. Oleh karenanya muncul sikap positif terhadap kelompok dirinya masing-masing (*ingroup*), berupa solidaritas internal, dan sikap negatif terhadap kelompok lain (*out-group*). Proses ini menumbuhkan jejaring sosial baru dan secara struktura terjadi perubahan akibat kelahiran kepemimpinan yang bersifat agresif. Akhirnya kondisi ini akar melahirkan konflik. Apabila konflik yang terjadi akar diselesaikan, maka masyarakat yang menghadap konflik harus mampu mengubah konflik, pertikaian atau perselisihan menjadi sebuah bentuk kerja sama.²²

Konflik berasal dari kata kerja Latin "*Confligere*" yang berarti "saling memukul". Konflik terjadi karena adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa

²² Lala Mulyowibowo Kolopaking, dkk. 2007. Jejaring Sosial dan Resolusi Konflik Masyarakat di Pedesaan (Kasus di Pulau Saparua Provinsi Maluku) . Jurnal Ilmu Pertanian Indonesi. Vol. 12 No.3 Hlm. 190.

individu/kelompok dalam suatu interaksi. Konflik merupakan situasi ketidaksepahaman yang melibatkan pihak-pihak karena merasa terancam dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Menurut Soekanto dalam Jamaludin, konflik diartikan sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.²³ Konflik menurut pandangan Fisher (2000), konflik diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan ataupun kepentingan, dalam mengontrol maupun mengendalikan pihak lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Jeong berpendapat bahwa konflik dimanifestasikan melalui aksi permusuhan, yang melibatkan dua atau lebih aktor dengan adanya ekspresi perbedaan disertai dengan permusuhan yang intens.²⁴ Konflik muncul ketika terjadi pertentangan untuk meraih tujuan, perbedaan nilai, keterbatasan sumberdaya; serta adanya perbedaan kepentingan pada individu, kelompok, dan masyarakat (Bartal, 2000; Byrne & Senehi, 2009; Deutch, 2006; Jeong, 2008).²⁵ Menurut Kartono & Gulo dalam Wulansari konflik berarti ketidaksepakatan dalam suatu pendapat, emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan.

Konflik terjadi di mana seseorang atau kelompok menampilkan praktik untuk 'menghapuskan' hak seseorang atau kelompok atas barang atau posisi

²³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama & Konflik Sosial Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal. 33

²⁴ Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution* (New York: Routledge, 2010), Hal. 3.

²⁵ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian* (Jakarta: Kompas, 2017), Hal. 49

yang disengketakan.²⁶ Dalam kehidupan manusia, munculnya konflik merupakan sesuatu yang alamiah. Konflik akan selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Yang dapat dan seharusnya dilakukan adalah bagaimana *me-manage* agar konflik tidak semakin meluas dan bagaimana menyelesaikan konflik tanpa meninggalkan residu sehingga konflik yang serupa tidak terjadi lagi pada waktu yang akan datang.

Ada banyak teori mengemukakan tentang konflik, salah satunya teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx tentang Teori Kelas. Kapitalisme semakin memperuncing kontradiksi antar kedua kelas sosial yang menyebabkan konflik pada kedua kelas. Eksploitasi kelas proletar oleh kaum borjuis secara terus menerus akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk memberontak kepada kaum borjuis yang akan menyebabkan revolusi sosial yang pada akhirnya kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas dan menciptakan masyarakat tanpa kelas.²⁷

Teori konflik lainnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakan "Imperatively coordinated associations" (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat

²⁶ Ichsan Malik, *Training Manual Peace Building and Conflict Prevention*, (Serap, 2007) hlm. 35

²⁷ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Hlm 218.

menyebabkan perubahan sosial. Dengan demikian, konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial.

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif, maka perlu diketahui apa yang menjadi permasalahan utama atau penyebab yang menjadi alasan terjadinya konflik. Menurut Malik, sumber konflik sosial di Indonesia ada 5, yaitu Konflik Struktural, Konflik Kepentingan, Konflik Nilai, Konflik Hubungan Sosial Psikologis, dan Konflik Data.²⁸ Konflik tawuran antar geng yang terjadi di Johar Baru ini termasuk ke dalam Konflik yang bersumber dari hubungan sosial psikologis. Karena konflik tawuran yang terjadi di Johar Baru ini sebagian besar muncul karena adanya pertentangan antar kelompok yang berawal dari prasangka, diskriminasi, dan sebab-sebab lainnya yang berasal dari dalam diri (psikologis) individu pelaku konflik tersebut.

Gagalnya pencegahan dini terhadap konflik dapat berujung pada terjadinya konflik dan eskalasi (peningkatan) konflik itu sendiri. Eskalasi konflik umumnya diawali dengan adanya ketegangan-ketegangan antara beberapa pihak, meningkat menjadi krisis, muncul kekerasan terbatas, dan berpuncak pada terjadinya kekerasan massal.²⁹

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif, maka perlu diketahui apa yang menjadi permasalahan utama atau penyebab yang menjadi alasan terjadinya konflik. Menurut Malik, sumber konflik sosial di Indonesia ada 5, yaitu Konflik Struktural, Konflik Kepentingan, Konflik Nilai, Konflik Hubungan Sosial Psikologis, dan Konflik Data.³⁰ Konflik tawuran antar geng yang terjadi di Johar Baru ini termasuk ke dalam Konflik yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13

²⁹ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017) hlm. 9

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13

bersumber dari hubungan sosial psikologis. Karena konflik tawuran yang terjadi di Johar Baru ini sebagian besar muncul karena adanya pertentangan antar kelompok yang berawal dari prasangka, diskriminasi, dan sebab-sebab lainnya yang berasal dari dalam diri (psikologis) individu pelaku konflik tersebut.

Pada umumnya, setiap interaksi antar individu akan selalu memunculkan persepsi tentang pribadi individu lain. Namun, untuk individu yang termasuk ke dalam sebuah entitas kelompok tertentu, akan cenderung memiliki bias persepsi terhadap individu lain yang tergabung di dalam kelompok selain kelompoknya. Hal inilah yang terjadi di Johar Baru. Bias persepsi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik/tawuran antar geng. Ada prasangka yang timbul kepada anggota geng lain yang menyebabkan rentannya kelompok-kelompok di Johar Baru dalam terjadinya konflik. Peneliti menggunakan Teori Konflik dalam penelitian ini untuk menganalisis konflik yang terjadi di Johar Baru.

2.1.4 Teori Resolusi Konflik

Secara umum strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan. Dengan berbekal peta tersebut, segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik. Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi-tindakan rasional untuk mengatasi konflik sosial, tidaklah benar-benar mampu menghapuskan akar-persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Pada kasus-kasus yang demikian itu, maka resolusi konflik sepantasnya dikelola (conflict management) pada derajat dan suasana yang sedemikian rupa

sehingga ledakan berupa “*clash-social*” yang bisa berdampak sangat destruktif dapat dihindarkan³¹.

Konflik sosial akan terus terjadi selama ada interaksi di dalam kehidupan masyarakat. Apabila konflik tidak dapat diatasi atau dicegah lebih awal, maka bukan tidak mungkin konflik berubah menjadi konflik destruktif yang dapat memakan banyak korban dan terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Christie dalam Ichsan Malik menyebutkan ada dua macam bentuk kekerasan yang muncul sebagai akibat konflik destruktif, yang pertama yaitu kekerasan episodic (*episodic violence*) yang merupakan bentuk kekerasan yang terjadi secara langsung, terjadi pembunuhan secara cepat, bersifat personal, dengan niat untuk menghancurkan, kekerasan terjadi secara terus menerus, kondisi selalu gawat, penuh penghinaan, serta dramatis. Kekerasan yang kedua yaitu kekerasan structural (*structural violence*), yaitu bentuk kekerasan yang terjadi secara tidak langsung, pembunuhan terjadi secara halus dan perlahan-lahan, berkelanjutan, kronis, impersonal, dan amoral.³² Resolusi konflik harus berasal dari situasi masyarakat setempat yaitu bagaimana masyarakat bisa mengelolah perbedaaan yang ada dan mencari hubungan persamaan budaya antar satu sama lain. Resolusi konflik bisa terjadi apabila ada keinginan yang datang dari masyarakat untuk memutus siklus konflik tersebut.

Dalam menghentikan kekerasan yang muncul tersebut, ada upaya yang disebut dengan *Peacemaking*. *Peacemaking* dilakukan dalam mengatasi kekerasan episodik, khususnya ketika ada tensi yang meningkat dalam sebuah kekerasan episodik. Upaya *Peacemaking* ini dilakukan untuk menghentikan kekerasan dan mencapai perjanjian damai dari pihak yang

³¹ Arya Hadi Dharmawan. 2006. Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat. Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006. Hlm. 11

³² *Ibid.*, hlm 50

berkonflik. Upaya lainnya yaitu *Peacebuilding*, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghentikan kekerasan struktural dan kultural, yang meliputi dimensi budaya, politik dan ekonomi. Upaya *peacebuilding* dilakukan demi mencapai damai yang positif.

Peneliti menggunakan Teori Resolusi Konflik dalam penelitian ini karena teori ini berkaitan dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Johar Baru.

2.1.5 Konsep Keamanan Nasional

Konsep Keamanan Nasional pada awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Ada kesamaan pemahaman bahwa persyaratan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara (*state*) adalah dengan menggunakan instrument ekonomi, diplomasi, kekuatan militer, dan kekuatan politik. Keamanan Nasional mencakup dua aspek, yang pertama aspek militer, dan yang kedua yaitu aspek non-militer yang di dalamnya termasuk seperti: keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan lingkungan dan keamanan manusia.

Pemahaman tentang keamanan nasional masih terdapat kerancuan karena setelah munculnya TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri yang menyebutkan bahwa keamanan menjadi tanggung jawab Polri, sedangkan pertahanan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan (*Security*) dapat dipahami sebagai makna yang luas, yang mencakup *defense* (pertahanan) dan *order* (ketertiban), di mana fungsi *defense* dilakukan oleh Militer dan fungsi *order* dilakukan oleh Kepolisian. Macmillan Dictionary dalam Nugroho mendefinisikan *National Security* sebagai "*the protection or the safety of a country's secrets and its*

citizens".³³Kamus Macmillan ini mendefinisikan keamanan nasional sebagai proteksi atau keamanan terhadap rahasia negara beserta masyarakatnya.

Selain definisi dari Macmillan Dictionary ini, Riant Nugroho juga mengutip pendapat dari Cyntia A. Watson (2008) yang memahami bahwa:

*"National security today is no longer concerned with defending national borders alone. National security includes protecting US citizens abroad, guaranteeing access to the assets we need to maintain our standard of living, and protecting the type of government we find important to sustaining the nations with which we interact. This is a dramatic shift from the views long held by many in the United States who might preferred democratic governance but deferred to the will of the people of the other states".*³⁴

Cyntia menekankan bahwa ada perubahan konteks yang terjadi dalam memahami apa itu keamanan nasional. Cyntia berpendapat bahwa keamanan nasional pada saat ini tidak terbatas hanya pada pertahanan di perbatasan, tapi juga meliputi perlindungan kepada penduduk yang berada di luar negeri, menjamin akses ke aset yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan menjaga standar kehidupan, dan melindungi pemerintahan demi keberlangsungan negara.

Konflik sosial yang terjadi di suatu daerah akan berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri, yang mana apabila tidak ditangani dengan segera dan secara keseluruhan, maka hal tersebut akan berdampak kepada stabilitas dan keamanan dalam negeri dan puncaknya akan mengancam keamanan nasional. Hal ini juga berlaku untuk konflik sosial yang terjadi di Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat. Jakarta merupakan ibukota negara

³³ Riant Nugroho, *National Security Policy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

³⁴ *Ibid*, hlm. 17

Indonesia, yang dapat disebut sebagai miniatur dari Indonesia itu sendiri. Apabila konflik yang terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat ini tidak dapat ditanggulangi, maka akan menjadi gangguan keamanan dalam negeri yang dapat berdampak kepada keamanan nasional. Inilah alasan Peneliti menggunakan Konsep Keamanan Nasional dalam penelitian ini.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, agar dapat menjadi perbandingan. Konflik sosial di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat telah berlangsung cukup lama dan menarik perhatian beberapa peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap fenomena ini.

Ada empat penelitian terdahulu yang akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Rahma Utami dilakukan pada tahun 2015 dengan judul "Pencegahan Konflik di Kecamatan Johar Baru". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memfokuskan penelitiannya kepada pencegahan konflik sosial di Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan resolusi konflik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada peranan pemerintah daerah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sembodo Aji dalam Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, yang berjudul "Kontrol Sosial Keluarga dan Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Keterlibatan Pemuda dalam Tawuran Warga di Johar Baru, Jakarta Pusat". Penelitian ini berfokus pada keterlibatan pemuda setempat dalam kasus tawuran yang terjadi di Kecamatan Johar Baru. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang konflik yang terjadi di Johar Baru. Perbedaan dari penelitian ini adalah subyek penelitian, penelitian terdahulu subyek penelitiannya adalah pemuda di

Kecamatan Johar Baru, sedangkan penelitian ini subyeknya adalah pemerintah daerah setempat.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Abiram Benhard Mauliate, Triarko Nurlambang, dan Djamang Ludiro yang berjudul “Wilayah Tawuran dan Wilayah Damai Tawuran Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat”. Persamaan dengan penelitian ini adalah wilayah Konflik yang terjadi di Johar Baru. Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu fokus pada diferensiasi wilayah tawuran dan wilayah damai tawuran di Kecamatan Johar Baru, sedangkan penelitian ini berfokus pada peranan pemerintah daerah setempat.

Penelitian lain yaitu penelitian oleh Setyo Sumarno, yang berjudul “Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru”. Persamaan penelitian ini adalah membahas konflik yang terjadi di Kecamatan Johar Baru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus kepada peranan pemerintah daerah setempat.

Tabel 2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dita Rahma Utami	Pencegahan Konflik di Kecamatan Johar Baru	Kualitatif	1. Konflik sosial yang terjadi di Johar baru disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor ekonomi,

				<p>kepadatan penduduk dan keadaan lingkungan sosial yang tidak baik.</p> <p>2. Solusi pencegahan konflik yang dapat menjadi alternatif adalah dengan mengedepankan pembenahan moral dan perilaku seluruh warga masyarakat untuk membangun suatu perdamaian yang positif.</p>
2	Dwi Sembodo Aji	Kontrol Sosial Keluarga dan Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Keterlibatan Pemuda dalam Tawuran Warga di Johar Baru, Jakarta Pusat	Kualitatif	<p>1. Ada kegagalan keluarga dalam melakukan kontrol sosial terhadap anak yang terlibat/melakukan kekerasan/tawuran.</p> <p>2. Dalam upaya menangkal pengaruh buruk</p>

				lingkungan sosial, ada usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam menerapkan mekanisme kontrol langsung dan tidak langsung.
3	Abiram Benhard Mauliate, Triarko Nurlambang, dan Djamang Ludiro	Wilayah Tawuran dan Wilayah Damai Tawuran Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat	Kualitatif	<p>1. Wilayah Tawuran tersebar pada perbatasan antar wilayah kekuasaan geng, dan wilayah tersebut memiliki kondisi sosial ekonomi yang buruk dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan termasuk ke dalam pemukiman kumuh.</p> <p>2. Wilayah damai tawuran terletak pada wilayah yang tidak berbatasan</p>

				dengan wilayah kekuasaan geng, dan tidak termasuk ke dalam pemukiman kumuh.
4	Setyo Sumarno	Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru	Kualitatif	<p>1. Konflik yang terjadi di Johar Baru merupakan konflik terbuka. Masing-masing pihak menunjukkan sikap dan tindakan pertentangan antar kelompok.</p> <p>2. Penyebab terjadinya tawuran masih belum diketahui secara pasti.</p> <p>3. Penanganan konflik dilakukan melalui pendekatan keamanan, sosial, ekonomi dan pekerjaan sosial.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konflik dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam menyelesaikan konflik di Johar Baru. Konflik yang terjadi di Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat ini telah berlangsung cukup lama dan selalu berulang. Setiap terjadinya tawuran di wilayah ini, hanya diselesaikan sebatas penyelesaian kekerasan tawuran yang terjadi, tidak diselesaikan sampai ke akarnya. Akibatnya Kecamatan Johar Baru merupakan daerah dengan Indeks Potensi Kerawanan Konflik tertinggi dari Kecamatan Lain di wilayah administratif Kotamadya Jakarta Pusat.

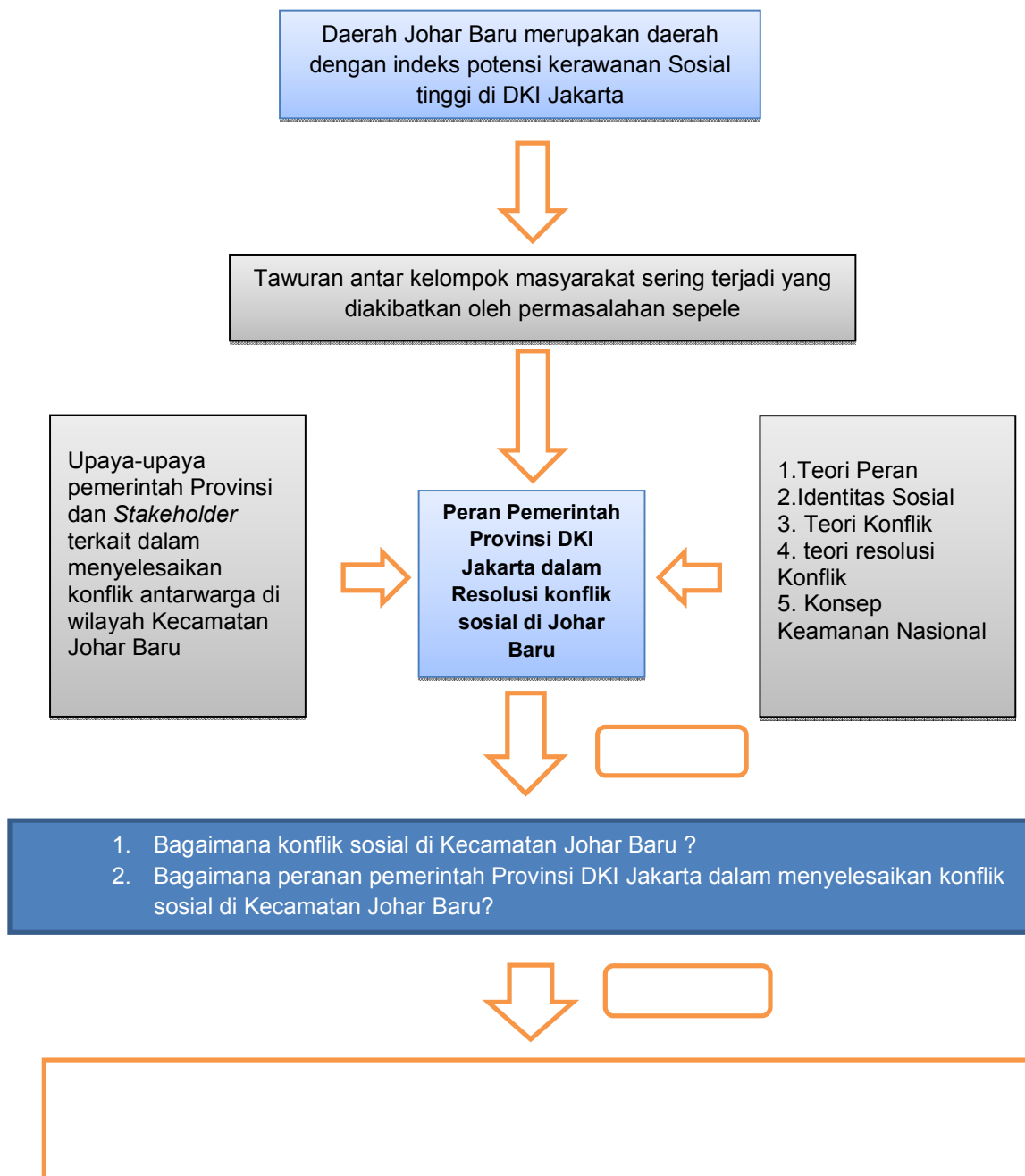
Konflik antar warga di Johar Baru Jakarta Pusat yang seringkali terjadi selalu dimulai dari hal yang sepele dan terjadi tanpa mengenal waktu, hal ini disebabkan karena wilayah Johar Baru merupakan wilayah yang padat penduduk ditambah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang jauh dari kata sejahtera. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta stakeholder terkait memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik antarwarga di wilayah Kecamatan Johar baru karena konflik antar warga di Johar baru dapat mengganggu stabilitas sosial dan kemandirian di wilayah tersebut.

Peneliti dalam melakukan serangkaian analisis terhadap Peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat dalam melakukan resolusi konflik sosial di wilayah Johar Baru menggunakan beberapa instrumen teori diantara : Teori Peran, Teori Konflik, Teori Resolusi Konflik, Teori Identitas Sosial dan Konsep Keamanan Nasional. Kemudian berdasarkan instrumen teori tersebut peneliti menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan konflik antar warga di wilayah Johar Baru.

Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai peran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan konflik antar warga.

Diharapkan dengan penelitian ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menemukan solusi yang tepat dalam penanganan konflik sosial di Johar Baru sehingga tercipta sebuah kondisi damai positif di wilayah Johar Baru sehingga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah Johar baru dapat terjaga. Kemantapan stabilitas sosial dan keamanan akan dapat meningkatkan iklim aman dan nyaman sehingga akan mendukung sektor-sektor lain di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat khususnya dan Provinsi DKI Jakarta khususnya. Belum adanya penyelesaian konflik sosial yang tepat di Johar Baru dan seringnya tawuran terus terjadi di wilayah ini membuat upaya yang dilakukan seolah kurang efektif. Sehingga masih tersisa residu-residu konflik yang akan kembali muncul dan berulang kembali.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis menguraikan kerangka pemikiran yang tertuang dalam ilustrasi berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Adapun lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang terkait yang menjadi lokus penelitian adalah yang memiliki peran langsung dalam penyelesaian konflik antarwarga Johar Baru. Lebih lanjut, pemilihan lokus tersebut juga untuk mempertimbangkan data yang akan diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Tempat-tempat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Lokasi Tempat Penelitian

No.	Instansi	Lokasi	Alamat
1.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Gambir	Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9, Blok F Lt 1, RT.11/RW.2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790
2	Polsek Johar Baru	Tanah Tinggi	Jl. Tanah Tinggi Barat, Johar Baru, Kramat, RT.6/RW.13, Tanah Tinggi, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540

3.	Koramil 08 Johar Baru	Johar Baru	Jl. Percetakan Negara II, RT.11/RW.6, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560
4.	Kantor Camat Johar Baru	Johar Baru	Jl. Johar Baru Utara I No.1, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Waktu penelitian merupakan kegiatan yang meliputi waktu pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Kegiatan penelitian akan berlangsung dalam jangka waktu kurang lebih selama tiga bulan, jadwal waktu kegiatan penelitian akan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4 Tabel Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2018							2019	
		Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Pembuatan Proposal Penelitian									
2.	Proses bimbingan									
3.	Seminar Proposal Penelitian									
4.	Perbaikan Proposal Penelitian									
5.	Pengumpulan Data									
6.	Analisis Data									

7.	Penyusunan Tesis									
8.	Ujian Hasil									
9.	Ujian Tesis									
10.	Perbaikan Tesis									
11.	Penyerahan Tesis									

3.2 Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian

Sumber data merupakan subjek darimana data penelitian diperoleh. Sedangkan, subjek penelitian merupakan orang, tempat, ataupun benda yang diamati dalam penelitian. Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun sumber data, subjek, dan objek dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sumber Data

Ada dua sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat dari. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan tertulis, dapat berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di Kecamatan Johar Baru.

3.2.2 Subjek Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian memegang peranan yang sangat signifikan dalam penelitian sebelum peneliti mengumpulkan data. Data diharapkan dapat digali dari orang-orang yang dianggap memiliki wawasan mengenai permasalahan yang ingin diteliti. Dalam penelitian

kualitatif, diperlukan subjek penelitian yang akan menjadi “pembuka pintu” dalam proses pengumpulan data.³⁵

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek-subjek penelitian antara lain adalah:

1. Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Kasubbid Penanganan Konflik Sosial, dengan Bapak Sony.
2. Kasie Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Johar Baru, dengan Ibu Yanti Sri Hidayat.
3. Kepala Polisi Sektor Johar Baru, dengan Kopol M. Endy Mahandika, S.H.
4. Komandan Koramil 08/Johar Baru, dengan Bapak Mayor Chb Endang Rahmat.
5. Babinsa Kel. Tanah Tinggi Koramil 08/Johar Baru, dengan Bapak Achmad Marullah.
6. Tokoh masyarakat di Johar Baru, Ketua RW 14 Kel. Tanah Tinggi, dengan Bapak Wahidin.
7. Tokoh pemuda di Johar Baru, Ketua Karang Taruna Kel. Tanah Tinggi, dengan Sugiarto.
8. Warga Kelurahan Johar Baru, dengan Bapak Syukri.

3.2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pemusatan dalam kegiatan penelitian, atau dapat juga dikatakan dengan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian merupakan peranan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dengan demikian, yang akan diteliti

³⁵ Mustain Mashud, *Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Pranadamedia Press, 2015)

yaitu mengenai peran Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam penyelesaian konflik sosial di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan berbagai wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini digunakan sebagai data sekunder dan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Dalam penelitian ini, peneliti mencari literatur yang mendukung penelitian ini dan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap topik dengan mempelajari buku-buku, jurnal, informasi mengenai lokasi penelitian, tulisan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan dan berita elektronik yang sesuai serta berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan diperlukan dalam membantu kegiatan penelitian dan juga untuk memperkuat analisis penulis dalam melakukan penelitian. Adapun sumber literatur yang digunakan penulis dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru.

b. Observasi

Bungin (2006)³⁶ mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Spradley (1980)³⁷ membagi partisipasi atau keterlibatan peneliti menjadi empat yaitu; (1) partisipasi pasif, di mana peneliti datang mengamati tetapi tidak ikut terlibat kegiatan yang diamati; (2) partisipasi moderat, di mana peneliti kadang ikut aktif terlibat kegiatan kadang tidak aktif; (3) partisipasi aktif, di mana peneliti terlibat aktif dalam kegiatan yang diteliti; (4) partisipasi lengkap, di mana peneliti sudah sepenuhnya terlibat sebagai orang dalam, sehingga tidak kelihatan sedang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, dimana peneliti hanya mengamati namun tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Observasi dilakukan untuk melihat, merasakan, memaknai beragam peristiwa dan gejala sosial. Dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu unsur yang cukup penting. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan per-catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan peninjauan lokasi penelitian.

c. Wawancara

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

³⁶ Aunu Rofiq Djaelani. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN*. Vol : XX, No : 1, Maret 2013 Hlm. 85.

³⁷ Ibid.,

³⁸ Ibid, hlm.106

respondennya sedikit/kecil³⁹. Menurut Sudarwan⁴⁰ berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif ada dua jenis wawancara yaitu; (1) wawancara relatif tertutup, di mana pertanyaan difokuskan pada topik khusus dan umum dan dibantu oleh panduan wawancara yang dibuat cukup rinci (2) wawancara terbuka, di mana peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan informan untuk memahami pandangan subjek penelitian mengenai kondisi dan situasi sosial di sekitarnya, sebagaimana diungkapkan dengan bahasanya sendiri. Wawancara diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara Tanya-jawab secara langsung. Adapun subyek wawancara dalam penelitian ini antara lain: Pemerintah Kota Jakarta Pusat (melalui Kasubbid Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol), Danramil Koramil 08/Johar Baru, Kepala Kepolisian Sektor Johar Baru, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Johar Baru, Tokoh Agama di Kecamatan Johar Baru, Tokoh Pemuda di Kecamatan Johar Baru dan eks pelaku konflik sosial di Johar Baru. Wawancara juga dilakukan dengan mempedomani pedoman wawancara yang telah disusun yang bersifat terbuka, sehinggakan informan bisa menyampaikan jawaban secara bebas atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tanpa terikat pada pilihan jawaban yang tersedia.

³⁹ Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). (Bandung : Alfabeta. 2007). Hlm. 137

⁴⁰ Aunu Rofiq Djaelani. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN*. Vol : XX, No : 1, Maret 2013 Hlm.87.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk memeriksa dan menguji akurasi data yang telah dikumpulkan penulis selama proses penelitian. Strategi yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi. Triangulasi merupakan cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda. Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk melakukan pengecekan atau perbandingan dengan data. Triangulasi meliputi beberapa hal, yaitu:
 - a. Triangulasi Metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti menggunakan cara wawancara dan observasi untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat demi memperoleh kebenaran informasi yang handal dan utuh.
 - b. Triangulasi Sumber, digunakan dalam mengeksplorasi kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain dari wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi, arsip, catatan atau tulisan pribadi dan gambar/foto.
 - c. Triangulasi Teori, hasil akhir yang diperoleh berupa rumusan informasi. Informasi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dengan tujuan untuk menghindari bias persepsi individual peneliti.⁴¹

⁴¹ Prof. Dr. H. Mudja Rahardjo, M.Si., "*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*", dalam <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses pada 18 Agustus 2018

2. *Expert Opinion*. Strategi ini merupakan tahap pematangan hasil akhir dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan peneliti di lapangan kepada para ahli di bidangnya, termasuk pembimbing dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan sebuah proses di mana data-data yang telah terkumpul baik melalui wawancara, observasi, survey, maupun studi kepustakaan disusun secara sistematis, sehingga kemudian dapat lebih mudah dipahami dan menjadi informasi bagi orang lain. Proses awal yang dilakukan adalah dengan mengolah data yang dimulai dengan cara melakukan *editing* terhadap data-data yang telah diperoleh. Dalam melakukan *editing* data, peneliti mengklasifikasikan jawaban atau data sesuai dengan macamnya atau disebut juga dengan proses *coding*. Setelah *editing* dan *coding* dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis.⁴² Proses analisis data dilakukan dengan model sebagai berikut:

1. Kondensasi Data. Kondensasi Data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan / atau mengubah data yang muncul dalam corpus penuh (badan) dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya.⁴³ Pemilihan *term* teknik analisis ini dikarenakan 'reduksi' data mengimplikasikan bahwa ada pelemahan atau penghilangan sesuatu (data) di dalam proses analisis. Proses ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil

⁴² *Ibid.*

⁴³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: a Method Sourcebook*, (United States of America: SAGE Publications, 1994)

pengamatan dan juga bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data tambahan apabila diperlukan.

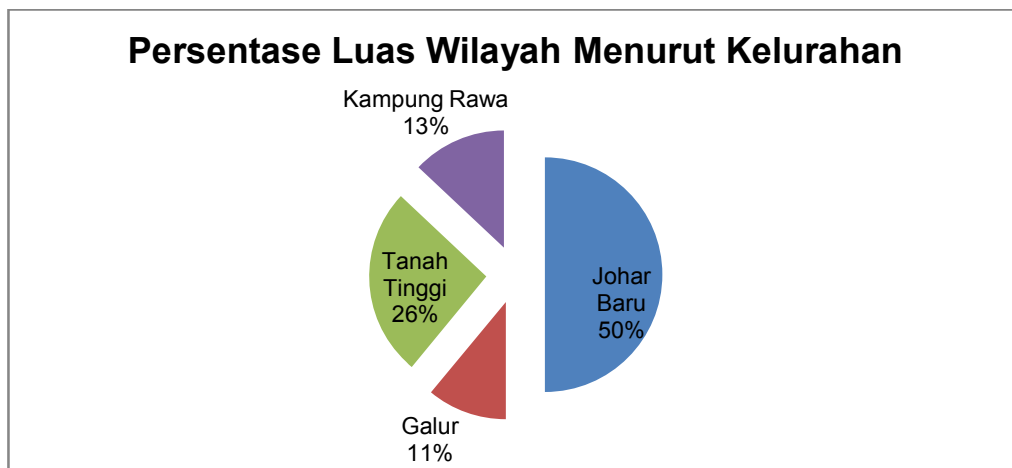
2. Penyajian Data. Data yang diperoleh kemudian dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan dalam melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.
3. Penyimpulan dan Verifikasi. Proses ini merupakan langkah selanjutnya dari kegiatan Kondensasi dan Penyajian Data. Data yang sudah dikondensasi-kan dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kumpulan sementara itu perlu diverifikasi. Teknik selanjutnya yang digunakan yaitu memverifikasi dengan cara triangulasi sumber data, metode, diskusi, dan pengecekan anggota. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah terverifikasi. Kesimpulan tersebut diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Geografis dan Demografis

Kecamatan Johar Baru merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang terletak di wilayah administrasi Kota Jakarta Pusat yang memiliki areal seluas 237,16 hektar. Kecamatan Johar Baru sendiri merupakan satu kecamatan hasil dari pemekaran Kecamatan Cempaka Putih. Dalam Kecamatan Johar Baru, terbagi 4 (empat) kelurahan, yaitu Kelurahan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa, Kelurahan Tanah Tinggi, dan Kelurahan Galur.⁴⁴ Di sebelah utara wilayah ini dibatasi oleh Jalan Letjen Suprpto, di sebelah Selatan dibatasi oleh Jalan Percetakan Negara, di sebelah barat dibatasi oleh rel kereta, dan di sebelah Timur wilayah ini dibatasi oleh Jalan Pangkalan Asem dan Jalan Mardani.



Gambar 4.1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kelurahan

⁴⁴ BPS Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Kecamatan Johar Baru dalam Angka*. (Jakarta, 2017) dalam <https://jakpuskota.bps.go.id/publication/2017/09/28/e8133509df42efe590ae908a/kecamatan-johar-baru-dalam-angka-2017.html>, diakses pada 2 Agustus 2018.

Kecamatan Johar Baru memiliki jumlah penduduk yang tercatat sejumlah 136.645 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 69.390 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 67.255 jiwa. Menurut Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Johar Baru, terdapat 40 Rukun Warga (RW) dan 558 Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Johar Baru. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Johar Baru mencapai 57.656 jiwa/Km². Data tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Johar Baru

No.	Kelurahan	Luas (Km2)	Jumlah			Jumlah Penduduk			Kepadatan Jiwa/Km2
			RW	RT	KK	LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Johar Baru	1,19	11	174	13.237	21.897	21.959	43.856	36.853,78
2.	Kp. Rawa	0,30	8	104	7.386	13.246	12.732	25.978	86.593,33
3.	Galur	0,26	7	84	8.613	11.543	10.800	22.343	85.934,62
4.	Tn. Tinggi	0,62	14	196	14.102	22.704	21.764	44.468	71.722,58
	Jumlah	2,37	40	558	43.338	69.390	67.255	136.645	57.656,12

Kepadatan Penduduk dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang berada atau mendiami suatu wilayah dalam luas tertentu. Kecamatan Johar Baru memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang tinggi di wilayah administratif Jakarta Pusat. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah ini disebut dengan "kepengapan sosial". Tingginya jumlah penduduk dalam suatu wilayah akan menimbulkan kepadatan (kesesakan) dalam wilayah tersebut. Kepadatan ini membuat potensi gesekan antar penduduk dapat menimbulkan suatu konflik.

Di Kecamatan Johar Baru, kepadatan penduduk telah mencapai 57.656 Jiwa/Km², yang mana artinya dalam satu kilometer persegi wilayah Johar Baru dihuni oleh 57.656 penduduk.

Kepadatan penduduk yang terjadi di Johar Baru terlihat dari penataan rumah yang berdesakan dan rumah penduduk yang berukuran sempit dimana rumah tersebut berfungsi sebagai dapur, tempat makan, ruang tidur dan tempat menyimpan barang-barang rumah tangga. Bahkan ada yang satu petak rumah dihuni oleh dua keluarga. Kepadatan penduduk merupakan masalah yang berdampak pada masalah-masalah lainnya seperti: banyaknya tempat tinggal yang sempit berupa rumah-rumah petak yang hanya dijadikan sebagai tempat tidur atau tempat istirahat saja. Tempat berkumpul, untuk dewasa di luar rumah atau di ujung gang yang memungkinkan mereka dapat duduk sebanyak 10 orang. Anak-anak hanya lalu lalang di sekitar jalan, sehingga semakin terlihat kepadatan penghuninya. Demikian juga, bagian jalan atau bagian tertentu dari rumah petak sebagai tempat mandi, mencuci dan menjemur pakaian. Penggunaannya secara bergantian dari tiap anggota rumah tangga. Ada juga kamar mandi dan kakus yang digunakan bersama-sama.

Tabel 4.2 Sepuluh Kelurahan dengan IPKS Tertinggi di Prov DKI Jakarta

Peringkat	Kelurahan	IPKS
1	Galur (Johar Baru/Jakarta Pusat)	40,52
2	Tanah Tinggi (Johar Baru/Jakarta Pusat)	40,39
3	Kampung Melayu (Jatinegara/Jakarta Timur)	39,23
4	Kartini (Sawah Besar/Jakarta Pusat)	38,07
5	Johar Baru (Johar Baru/Jakarta Pusat)	37,72
6	Kali Baru (Cilincing/Jakarta Utara)	37,71

7	Kampung Rawa (Johar Baru/Jakarta Pusat)	37,66
8	Penjaringan (Penjaringan/Jakarta Utara)	35,90
9	Kebon Melati (Tanah Abang/Jakarta Pusat)	35,45
10	Menteng (Menteng/Jakarta Pusat)	35,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dalam data BPS tahun 2014 mengenai Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) dan data Pemetaan Kawasan rawan Konflik dari Kesbangpol DKI Jakarta 2014, Kecamatan Johar Baru termasuk dalam wilayah dengan tingkat kerawanan sosial dan kerawanan konflik yang tinggi. Empat kelurahan di Johar Baru yaitu Tanah Tinggi, Galur, Johar Baru dan Kampung Rawa. Apabila dilihat dari segi geografis dan historis, Kecamatan Johar Baru berada di wilayah Pasar Senen, daerah yang lekat dengan berbagai tindak kejahatan, dengan tingkat kejahatan dan kekerasan skala kecil hingga menengah seperti pencopetan, perampokan dan tawuran antar pelajar yang terjadi pada komunitas kelas bawah dan padat penduduk, bahkan juga konflik dengan skala besar seperti kerusuhan Mei 1998.⁴⁵

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Johar Baru

Kondisi sosial-ekonomi dapat menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Tinggi atau rendahnya kondisi ini dapat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kecamatan Johar Baru merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tata letak permukiman yang saling berdesakan, tidak ada fasilitas pembuangan air, pembuangan sampah, area bermain anak yang memadai sehingga anak-anak bermain di jalanan. Sebagai akibat kurangnya fasilitas, penduduk membuang sampah dan limbah

⁴⁵ Jerome Tadie. *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. 2009. Depok: Masup Jakarta

rumah tangga disembarang tempat, anak-anak bermain di jalanan, jemuran didepan rumah, bau tak sedap dan lingkungan terlihat kotor dan kumuh. Kondisi yang demikian akan mempengaruhi derajat kesehatan dan kesejahteraan warga dan ketidaan rasa nyaman di lingkungan tempat tinggal. Permasalahan berikutnya, yaitu penduduk kesulitan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dan pendidikannya. Pada umumnya lowongan pekerjaan menerima tenaga kerja berpendidikan minimal SLTA. Persaingan yang cukup ketat dalam mencari pekerjaan, menyebabkan sebagian pencari kerja dari Kecamatan Johar Baru merasa tersisih. Di pihak lain, dikarenakan sering terjadi tawuran - menyebabkan perusahaan tidak bersedia menerima tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari Kecamatan Johar Baru.⁴⁶



Gambar 4.1 Kondisi Pemukiman Rusun Baladewa, Johar Baru
Sumber: internet (data diolah oleh peneliti)

⁴⁶Setyo Sumarno, " Problema Dan Resolusi Konflik Sosial Di Kecamatan Johar Baru - Jakarta Pusat". Jurnal Konsepsia. Vol. 3 No. 2, Tahun 2014,. Hlm . 6

Tingkat pendidikan masyarakat juga sangat memprihatinkan. Rata-rata pendidikan masyarakat merupakan lulusan sekolah dasar dan SMP. Tingkat pendidikan masyarakat yang demikian tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak memadai. Akibatnya banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah dan terpaksa *drop out* yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran menyebabkan tingginya angka kriminalitas di lingkungan tersebut.⁴⁷

Hal inilah yang membuat aktivitas keseharian warga kebanyakan hanya kumpul-kumpul di pinggir jalan ataupun gang, bergerombol kesana kemari tanpa ada tujuan yang jelas. Dan tidak sedikit anak muda yang berkumpul di gang atau pinggir jalan ini nongkrong sambil minum minuman keras dan bahkan mengkonsumsi narkoba. Kapolsek Johar Baru mengungkapkan bahwa pada saat anggota kepolisian sektor Johar Baru melakukan patroli di wilayah ini, mereka sering mendapati bahwa anak-anak muda tersebut telah mengkonsumsi minuman keras yang tercium dari nafas mereka dan anggota polsek langsung membubarkan anak-anak muda tersebut (menyuruh pemuda-pemuda yang sedang kumpul-kumpul untuk pulang).⁴⁸

Kondisi anak-anak muda yang berkumpul di pinggir jalan di wilayah Johar baru ini khususnya yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba tentunya rentan memicu tersinggungan yang dapat berujung pada terjadinya tawuran antar kelompok di wilayah tersebut. Dan di ketika ada konflik yang awalnya hanya diawali oleh dua-tiga orang, akan mudah membesar menjadi konflik antar kelompok. Apabila ada anggota kelompok yang menghadapi masalah dengan kelompok lain, mereka kompak untuk menyerang kelompok

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Wawancara dengan Kopol M. Endy Mahandika, S.H., Kepala Polisi Sektor Johar Baru di kantor Polsek Johar Baru, 1 February 2019

lain tersebut. Dan kelompok yang diserang akan menyerang balik dengan alasan mempertahankan wilayah (bertahan).

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh para pemuda yang terlibat dalam konflik tawuran ini disebabkan oleh isu mengenai keamanan sumber daya seperti keamanan anggota keluarga, rumah, fasilitas, wilayah dan sebagainya. Konflik tawuran yang terjadi di wilayah ini tidak hanya berbasis pada kelompok (geng) saja, tetapi juga berbasis pada konteks spasial wilayah, mereka ikut terlibat aksi konflik tawuran demi mempertahankan diri dan membela kampung serta melindungi keluarga dan teman.⁴⁹

4.2.2 Rangkaian Peristiwa Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru

Kondisi demografis dan sosial ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Johar Baru, menimbulkan banyak permasalahan yang menjadikan wilayah ini menjadi kawasan konflik yang terus berulang-ulang. Konflik antar kelompok warga yang terjadi di Kecamatan Johar Baru ini sudah terjadi sejak lama dan membuat Kecamatan Johar Baru menjadi Kecamatan dengan Indeks Potensi Kerawanan Sosial tertinggi di Provinsi DKI Jakarta.⁵⁰ Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) diukur oleh beberapa aspek, seperti Indeks Kerawanan Kemiskinan, Indeks Kerawanan Lingkungan dan Kesehatan, Indeks Kerawanan Prasarana Fisik, Indeks Kerawanan Modal Sosial, Indeks Kerawanan Keamanan, dan Indeks Kerawanan. Dari 10 (sepuluh) Kelurahan dengan IPKS tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, 4 (empat) Kelurahan merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Johar Baru,

⁴⁹ Dwi Sembodo Adi, "Kontrol Sosial Keluarga dan Kekerasan Kolektif": Studi Kasus Keterlibatan Pemuda dalam Tawuran Antarwarga di Johar Baru, Jakarta Pusat". Jurnal Masyarakat, Jurnal Sosiologi UI, Vol 22, No. 2 Juli 2017

⁵⁰ Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) DKI Jakarta 2014, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

yang berarti Kecamatan Johar Baru memang mempunyai kerawanan sosial di semua wilayahnya.

Telah banyak peristiwa konflik antarwarga yang terjadi di Kecamatan Johar Baru. Sering kali penyebab terjadinya konflik antarwarga di wilayah ini dimulai dari hal-hal yang sepele dan tanpa penyebab yang jelas. Konflik yang terjadi di wilayah ini juga seringkali tidak mengenal waktu. Kadang konflik antarwarga dapat terjadi hanya karena ejek-ejekan antar pemuda yang berujung pada konflik antar kelompok yang mengatasnamakan solidaritas. Konflik juga dapat terjadi karena anak-anak, wanita atau kesalahpahaman lainnya yang diikuti oleh provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya berujung pada konflik antar kelompok warga.

Konflik antarwarga yang terjadi di Kecamatan Johar Baru tidak mengenal waktu, bahkan juga terjadi pada saat perayaan hari besar keagamaan seperti malam Idul Adha dan Malam Idul Fitri. Suasana yang seharusnya menjadi hari suci bagi penduduk yang mayoritas beragama Islam tersebut tidak menghentikan mereka untuk melakukan aksi kekerasan di antara mereka. Seperti pada perayaan hari besar Idul Adha, Jum'at (1 September 2017), terjadi konflik antar kelompok warga RW 04 Kampung Rawa (warga *Lepoy*), dengan warga RW 07 Gang Buntu Kampung Rawa. Provokator dari konflik ini mengawali tawuran dengan aksi lempar genteng yang kemudian berlanjut kepada aksi kekerasan antar kedua kelompok di mana 10 (sepuluh) orang tersangka kemudian ditangkap oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat.⁵¹

⁵¹ Tempo, *Tawuran Antarwarga di Johar Baru, 10 Orang Tersangka Ditangkap*, dalam <https://metro.tempo.co/read/905615/tawuran-antarwarga-di-johar-baru-10-orang-tersangka-ditangkap/full&view=ok> diakses pada 2 September 2018

Pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018, konflik tawuran kembali terjadi lagi di wilayah Johar Baru, tepatnya pada pukul 22.01.⁵² Para pelaku tawuran ini saling serang antar kelompok dengan menggunakan berbagai benda, seperti batu, botol dan genting. Tidak hanya itu, namun beberapa warga juga tertangkap membawa beberapa senjata tajam. Kejadian ini segera diamankan oleh polisi dan TNI sekitar selang 5 menit sejak tawuran terjadi. Polisi langsung melontarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang terlibat tawuran.

Dari data tawuran warga di wilayah Kecamatan Johar Baru pada tahun 2016, tercatat telah terjadi 27 kali konflik tawuran yang berlangsung di wilayah padat penduduk ini. Sebagian besar tawuran terjadi antar kelurahan. Namun tidak sedikit konflik antarwarga ini dilakukan oleh warga kelurahan yang sama namun beda RW (Rukun Warga). Kebanyakan para pelaku tawuran berdalih bahwa mereka ikut melakukan aksi kekerasan dengan alasan untuk membela teman dan wilayah tempat tinggalnya. Ikut melakukan tawuran merupakan suatu kebanggaan bagi para pelaku tawuran ketika mereka dapat membela daerah wilayahnya sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh mantan pelaku konflik yang saat ini menjabat sebagai Ketua Karang Taruna di Kel. Tanah Tinggi,

“Kita (Geng Gambreng/warga RW 14) ama sebelah (Geng Baladewa/warga RW 04) emang musuh bebuyutan, kita tuh kalau udah pecah (tawuran) itu sampe dibilang *el classico*⁵³ sama para tetangga. Ya kalau udah liat temen tawuran ya kita ikut turun buat

⁵² Detik News. *Tawuran Antarwarga Kembali Terjadi di Johar Baru*. Diakses pada 20 Februari 2019.

⁵³ *El clasico* merupakan pertandingan sepakbola yang mempertemukan dua klub besar di Liga Spanyol, yaitu Real Madrid dan Barcelona. Geng Gambreng (pemuda RW 14 Kelurahan Tanah Tinggi) dan Geng Baladewa (pemuda RW 04 Kelurahan Tanah Tinggi) merupakan dua geng yang sudah sangat terkenal di Kecamatan Johar Baru. Kedua Geng ini sudah sering tawuran sejak lama, dan ketika kedua Geng ini tawuran, dianggap sebagai pertarungan besar di wilayah ini seperti layaknya *el clasico*.

ngebela, kalo kita kalah rumah susun (tempat tinggal warga RW 14) bisa dimasuk-masukin sama mereka, dijarah.”⁵⁴

Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanah Tinggi ini menyebutkan bahwa, selain rasa solidaritas, mereka ikut melakukan aksi kekerasan agar wilayahnya tidak dijarah ketika kalah dalam tawuran. Tidak sekali dua kali lawan yang dimaksud melakukan aksi penjarahan ketika “memenangkan” tawuran di lokasi. Hal inilah yang menjadi dalih bagi para pelaku tawuran dalam melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok lainnya.

Di tahun 2017, aksi tawuran yang terjadi di Kecamatan Johar Baru mulai berkurang. Tercatat dalam data rekapitulasi aksi konflik tawuran yang diperoleh penulis dari Polsek Johar Baru, konflik tawuran di tahun 2017 berlangsung sebanyak 13 kali, berkurang sekitar 50% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar konflik tawuran yang terjadi pada tahun 2017 di Kecamatan Johar Baru dilakukan oleh warga kelurahan Kampung Rawa dan warga Kelurahan Tanah Tinggi. Dan tidak sedikit aksi tawuran dilakukan oleh kelompok warga dari kelurahan yang sama namun berbeda RW (Rukun Warga).

Umumnya, aksi konflik tawuran yang terjadi di wilayah Johar Baru ini dimulai/ditandai dengan adanya petasan atau mercon yang dinyalakan oleh pihak yang menjadi provokator atau yang memulai konflik tawuran. Hal ini dibenarkan oleh Komandan Rayon Militer 08/Johar Baru, Mayor Chb Endang Rahmat. Ia menyebutkan bahwa ketika petasan/mercon sudah dinyalakan, maka itu menjadi pertanda dan pancingan bagi kelompok yang akan tawuran untuk memulai aksi kekerasan.⁵⁵ Untuk alat yang digunakan oleh para pelaku

⁵⁴ Wawancara dengan Sugiarto, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanah Tinggi, 13 Januari 2019.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mayor Chb Endang Rahmat, Komandan Rayon Militer 08/Johar Baru, 9 Januari 2019

tawuran di wilayah Johar Baru, umumnya mereka menggunakan batu dan botol kaca.

Intensitas konflik tawuran yang terjadi di Johar Baru pada Tahun 2018 juga mengalami pengurangan yang cukup signifikan seperti tahun 2017, sekitar 50%, yaitu sebanyak 6 kali. Untuk gaya tawuran masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu menggunakan alat berupa batu dan botol kaca, serta umumnya dimulai dengan menyalakan petasan sebagai pertanda dan pancingan untuk melakukan aksi tawuran. Aksi konflik tawuran antar kelompok warga di Kecamatan Johar Baru terakhir tercatat terjadi pada hari Rabu, 08 Agustus 2018 pukul 18.30 WIB, terjadi di Kelurahan Johar Baru. Alasan terjadinya konflik masih sama, yaitu dimulai dari hal yang sepele, yaitu saling ejek warga RW 08 dengan RW 01 Kelurahan Johar Baru yang kemudian saling menyerang dengan menggunakan batu dan botol kaca.

Lampiran Rekapitulasi Data Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru Tahun 2018

N O	TANGGAL / WAKTU KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	PENYEBAB	TINDAKAN KEPOLISIAN	PELAKU, BB YANG DIAMANKAN
1	Minggu, 17 Januari 2018 jam.15.40 wib.	Jl.Kramat Pulo Gundul Velbak Rw.013 Vs Rw.010 Kel. Tanah Tinggi.	Saling ejek warga Rw.010 dengan Rw.013 Kel. Tanah Tinggi lalu saling menyerang dengan menggunakan Petasan, Batu dan Botol Kaca.	-Sweping, mencari saksi-saksi. -Mengamankan Barang Bukti. -Menempatkan Anggota di TKP -Memberikan himbauan- Himbauan -Mediasi kedua belah pihak.	-Petasan yang bekas di gunakan. -Batu, Botol kaca minuman
2	Minggu, 08 April 2018 jam.01.30 wib.	Jl. Rawa Tengah (Pondokan Jawa) Kel. Galur	Saling ejek warga Rw.07 dengan Rw.06 Kel. Galur lalu saling menyerang dengan menggunakan Petasan, Batu dan Botol Kaca.	-Sweping, mencari saksi-saksi. -Mengamankan Barang Bukti. -Menempatkan Anggota di TKP -Memberikan himbauan- Himbauan -Mediasi kedua belah pihak.	-Petasan yang bekas di gunakan. -Batu, Botol kaca minuman
3	Kamis, 03 Mei 2018 jam.22.30 wib.	Jl. T Kel. Kampung Rawa	Saling ejek warga Rw.05 dengan Rw.03Kel. Kampug Rawa	-Sweping, mencari saksi-saksi. -Mengamankan Barang Bukti. -Menempatkan Anggota di TKP -Memberikan himbauan-	-Petasan yang bekas di gunakan. -Batu, Botol kaca minuman

			lalu saling menyerang dengan menggunakan Petasan, Batu dan Botol Kaca.	Himbauan -Mediasi kedua belah pihak.	
3	Sabtu, 14 Juli 2018 jam.22.30 wib.	Jl. Baladewa Kel. Tanah Tinggi	Saling ejek warga Rw.05 dengan Rw.04 Kel. Tanah Tinggi lalu saling menyerang dengan menggunakan Petasan, Batu dan Botol Kaca.	-Sweping, mencari saksi-saksi. -Mengamankan Barang Bukti. -Menempatkan Anggota di TKP -Memberikan himbauan- Himbauan -Mediasi kedua belah pihak.	-Petasan yang bekas di gunakan. -Batu, Botol kaca minuman
4	Sabtu, 21 Juli 2018 jam.02.30 wib.	Jl. Narada Kel. Tanah Tinggi	Saling ejek warga Rw.05 dengan Rw.07 Kel. Tanah Tinggi lalu saling menyerang dengan menggunakan Petasan, Batu dan Botol Kaca.	-Sweping, mencari saksi-saksi. -Mengamankan Barang Bukti. -Menempatkan Anggota di TKP -Memberikan himbauan- Himbauan -Mediasi kedua belah pihak.	-Petasan yang bekas di gunakan. -Batu, Botol kaca minuman
5	Minggu, 05 Agustus 2018 jam.05.30 wib.	Jl. Kramat Jaya Baru Kel. Johar Baru	Saling ejek warga Rw.08 dengan Rw.01 Kel. Johar Baru lalu saling menyerang	-Sweping, mencari saksi-saksi. -Mengamankan Barang Bukti. -Menempatkan Anggota di TKP -Memberikan himbauan- Himbauan	-Petasan yang bekas di gunakan. -Batu, Botol kaca minuman

			dengan menggunakan Petasan, Batu dan Botol Kaca.	-Mediasi kedua belah pihak.	
6	Rabu, 08 Agustus 2018 jam.18.30 wib.	Jl. Kramat Jaya Baru Kel. Johar Baru	Saling ejek warga Rw.08 dengan Rw.01 Kel. Johar Baru lalu saling menyerang dengan menggunakan Petasan, Batu dan Botol Kaca.	-Sweping, mencari saksi-saksi. -Mengamankan Barang Bukti. -Menempatkan Anggota di TKP -Memberikan himbauan- Himbauan -Mediasi kedua belah pihak.	-Petasan bekas di gunakan. -Batu, Botol kaca minuman

Kapolsek Johar Baru menyatakan bahwa, berhentinya konflik tawuran yang terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru sejak ia ditempatkan di wilayah ini tidak terlepas dari upayanya melakukan pencegahan dini terhadap konflik tawuran yang mungkin dapat terjadi di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian dan babinsa yang rutin melakukan patroli gabungan selalu berusaha membubarkan anak-anak muda yang sedang 'ngumpul' di pinggir jalan atau gang tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut diyakini oleh Kapolsek Johar Baru dapat mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Kapolsek Johar Baru:

“Saya (Kapolsek) baru dapat surat mutasi pada September 2018 dan baru mulai aktif (menempati kantor) pada Oktober 2018, dan sejak saya di sini tidak pernah sampai terjadi tawuran antarwarga. Saya menggunakan konsep pencegahan, dengan adanya kejadian yang sudah-sudah saya pun menganalisa, bagaimana dan seperti apa terjadinya tawuran di Johar Baru ini ... yang saya lakukan adalah patroli yang sifatnya membubarkan paksa mereka yang masih bergerombol di jalan. Karena ngumpul-ngumpul di jalan merupakan ajang mereka untuk menunggu 'lawan' ataupun mencari 'lawan'. Dan setelah saya pelajari ini tidak bisa dibiarkan.”⁵⁶

Kapolsek Johar Baru menganggap bahwa membubarkan anak-anak muda yang sedang kumpul di pinggir jalan merupakan salah satu hal yang tepat untuk mencegah adanya gesekan antar kelompok yang dapat memicu terjadinya konflik tawuran. Karena itulah, pihak kepolisian dan koramil sepakat untuk segera membubarkan anak-anak muda yang sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan demi mencegah terjadinya konflik tawuran.

⁵⁶ Wawancara dengan Kopol M. Endy Mahandika, S.H., Kepala Polisi Sektor Johar Baru di kantor Polsek Johar Baru, 1 February 2019

4.2.3 Struktur Konflik dan Penyebab Konflik di Kecamatan Johar Baru

Menurut Buku 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, empat (4) kelurahan yang ada di Kecamatan Johar Baru termasuk dalam klasifikasi *Perkotaan*. Kriteria wilayah *perkotaan* adalah persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan⁵⁷, yang dimiliki oleh suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan.⁵⁸ Padatnya wilayah Kecamatan Johar Baru menjadi salah satu faktor yang memicu seringnya terjadi konflik antarwarga di wilayah tersebut. Menurut Badan Standardisasi Nasional, kepadatan penduduk di Kecamatan Johar Baru yang mencapai 57.656 jiwa/Km² atau 573 jiwa/ha menjadikan Kecamatan Johar Baru sebagai Kecamatan dengan klasifikasi kepadatan penduduk Sangat Padat.

Tabel 4.3 Klasifikasi Tingkat Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Tingkat Kepadatan
<150 Jiwa/Ha	Rendah
151-200 Jiwa/Ha	Sedang
201-400 Jiwa/Ha	Tinggi
>400 Jiwa/Ha	Sangat Padat

Sumber: Badan Standardisasi Nasional

⁵⁷ Fasilitas Perkotaan yang dimaksud adalah tersedianya Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Pasar, Pertokoan, Bioskop, Rumah Sakit, Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon, Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon, dan Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik.

⁵⁸ Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia.

Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Johar Baru ini merupakan salah satu faktor penyebab mudahnya terjadi gesekan atau tersinggungan antar warga yang tinggal di wilayah tersebut. Karena dengan tempat tinggal yang kecil dan ditempati oleh banyak orang (1 tempat tinggal ditempati oleh dua kepala keluarga atau lebih), warga Johar Baru banyak yang harus bergantian untuk tidur atau berada di dalam rumah. Kebiasaan yang ada di wilayah Johar Baru, ketika para orang tua pergi bekerja pada pagi sampai sore, anak-anak muda menggunakan tempat tinggal untuk beristirahat, dan ketika para orangtua sudah kembali ke rumah maka anak-anak muda akan keluar dan kumpul-kumpul di pinggir jalan karena tempat tinggal sedang digunakan untuk beristirahat.

Faktor lainnya yaitu tingginya tingkat pengangguran yang ada pada masyarakat Johar Baru. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan warga yang ada di wilayah tersebut. Namun, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa banyak perusahaan yang tidak mau ambil resiko dengan merekrut calon pekerja yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Johar Baru. Citra negatif wilayah Kecamatan Johar Baru telah membuat banyak masyarakat, khususnya pemuda mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Karang Taruna kelurahan Tanah Tinggi. Ia menyatakan bahwa, ia sering mendapatkan penolakan atas lamaran pekerjaannya karena ia berasal dari Kecamatan Johar Baru yang sudah terkenal akan kebiasaan tawuran anak muda yang ada di sini.

“Yaa gitu Mba, kita susah kalau mau nyari kerjaan. Udah sering masukin lamaran kerja ke mana-mana, jangankan diterima, lanjut tahap administrasi aja engga. Dari Polsek dan Kecamatan juga udah dikasih tau kalo wilayah kita ini udah kena *blacklist* sama perusahaan-perusahaan. Makanya, karna banyak perusahaan yang *blacklist* wilayah kita, jadi ngelamar kemana-mana juga susah. Kita sih berharapnya *blacklist* terhadap pencari kerja dari wilayah Kecamatan

Johar Baru bisa dicabut, jadi kita juga punya kesempatan dan ngga nganggur terus. Lagian kita kan udah ngga pernah ngelakuin tawuran lagi nih.”⁵⁹

Hal inilah yang juga merupakan faktor yang membuat semakin besarnya angka pengangguran di wilayah Kecamatan Johar Baru. Hal ini tentu menimbulkan masalah lainnya, khususnya dalam hal finansial. Para pengangguran yang ada di wilayah Kecamatan Johar Baru tentu tidak dapat membiayai diri mereka sendiri, apalagi jika mereka juga sudah berkeluarga. Hal ini akan menjadi sebuah tekanan batin karena mereka akan dianggap tidak mampu “mencari uang”. Untuk para pengangguran yang sudah berkeluarga, sudah tentu juga menjadi masalah dan dapat membuat hubungan keluarga menjadi berantakan. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku warga, karena kebanyakan dari mereka mengalami permasalahan yang hampir serupa yang membuat mudahnya terjadi konflik pribadi yang kemudian berujung pada konflik antar kelompok warga.

Anak-anak muda yang tinggal di kawasan padat Johar Baru yang sejak kecil telah terbiasa hidup di luar rumah (karena rumah terlalu sempit dan bergantian tidur dengan para orang tua), cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan pergaulan dengan teman-temannya. Aktifitas yang dilakukan oleh anak-anak muda yang tinggal di wilayah kecamatan Johar Baru sering kali kumpul-kumpul di jalan dan minum minuman keras. Kapolsek Johar Baru dan Danramil 08/Johar Baru menyatakan, ketika mereka atau anggotanya melakukan patroli gabungan, mereka sering kali mendapati anak-anak muda yang kumpul-kumpul dan minum-minuman keras.⁶⁰ Makadapat disimpulkan bahwa, anak-anak muda yang tinggal di lingkungan padat penduduk yang mengharuskan mereka untuk

⁵⁹ Wawancara dengan Sugiarto, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanah Tinggi, 13 Januari 2019.

⁶⁰ Wawancara bersama Kapolsek Johar Baru dan Danramil 08/Johar Baru di tempat dan waktu terpisah.

menghabiskan waktu di luar rumah dan kumpul-kumpul dengan anak-anak muda lainnya membuat mereka menjadi lebih rentan terpengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik. Anak-anak muda yang minum minuman keras dan kadang didapati sudah dalam kondisi sudah mabuk ini berpotensi memunculkan konflik. Mereka dapat melakukan ejek-ejekan atau bahkan menyerang orang-orang yang sedang melewati mereka dan berujung pada konflik antar kelompok, karena pasti akan ada balas dendam dari kelompok lain ini yang datang membawa serta anggota kelompok di wilayah tempat tinggalnya.

Kepadatan penduduk, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan rusaknya pergaulan anak-anak muda yang tinggal di wilayah Kecamatan Johar Baru merupakan faktor-faktor yang menjadi pemicu rentan terjadinya konflik tawuran antarwarga di wilayah tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru

Ichsan Malik menjelaskan bahwa konflik merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya perbedaan ciri-ciri dari suatu individu/kelompok terhadap kelompok lain dalam suatu interaksi. Perbedaan ini menimbulkan ketidaksepahaman yang berujung kepada perselisihan. Perselisihan muncul dari pihak-pihak yang merasa kebutuhannya terancam. Perbedaan ciri-ciri suatu individu/kelompok tidak menjadi suatu sebab terjadinya konflik pada wilayah Johar Baru. Konflik justru terjadi diantara orang-orang dengan latar belakang keluarga dan kondisi social yang cenderung sama. Konflik sosial Johar Baru menunjukkan bahwa kemunculan konflik tidak harus berasal dari ciri-ciri kelompok yang berbeda. Namun terdapat faktor lain yang menjadi penyebab kemunculannya.

Tidak seperti pengklasifikasian yang dijelaskan dalam teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx atau Ralf Dahrendorf yang menjelaskan konflik dalam bentuk benturan hirarki, baik antara borjuis dan proletar atau antara penguasa dan rakyat, konflik yang terjadi di Johar Baru merupakan konflik sosial yang muncul karena adanya masalah-masalah kondisi sosial di dalam masyarakatnya. Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Johar Baru ini merupakan salah satu faktor penyebab mudahnya terjadi gesekan pemicu konflik antar warga yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan tingginya jumlah pengangguran pada masyarakat. Kondisi wilayah yang padat dengan penduduknya yang tidak memiliki pekerjaan menjadikan wilayah ini menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga penduduk akan mencari segala cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tingginya tingkat pengangguran juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tidak memenuhi persyaratan ketika hendak mencari pekerjaan.

Oleh karena itu dalam memahami konflik yang terjadi di Johar Baru diperlukan analisa dari berbagai aspek untuk mengetahui penyebab dan langkah yang dapat diambil. Hal penting yang harus dilakukan dalam upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif yaitu mencari tahu penyebab utama dari konflik tersebut. Menurut Malik konflik sosial yang terjadi di Indonesia sering kali disebabkan oleh 5 hal berikut, yaitu:

- Konflik Struktural

Dalam konflik ini terdapat ketimpangan dalam akses dan control sumber daya, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengabil keputusan.

- Konflik Kepentingan

Dalam konflik ini terjadi karena adanya upaya pemuasan kebutuhan dan cara untuk memenuhinya dengan mengorbankan orang lain, serta terjadi persaingan yang tidak sehat dalam lingkup politik, sosial, dan budaya.

- Konflik Nilai

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan adat, nilai ideologis, implementasi agama.

- Konflik Hubungan Sosial dan Psikologis

Terjadi karena adanya stereotip, prasangka dan stigmatisasi].

- Konflik Data

Konflik ini terjadi karena kurangnya informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, perbedaan interpretasi serta pemalsuan sejarah.

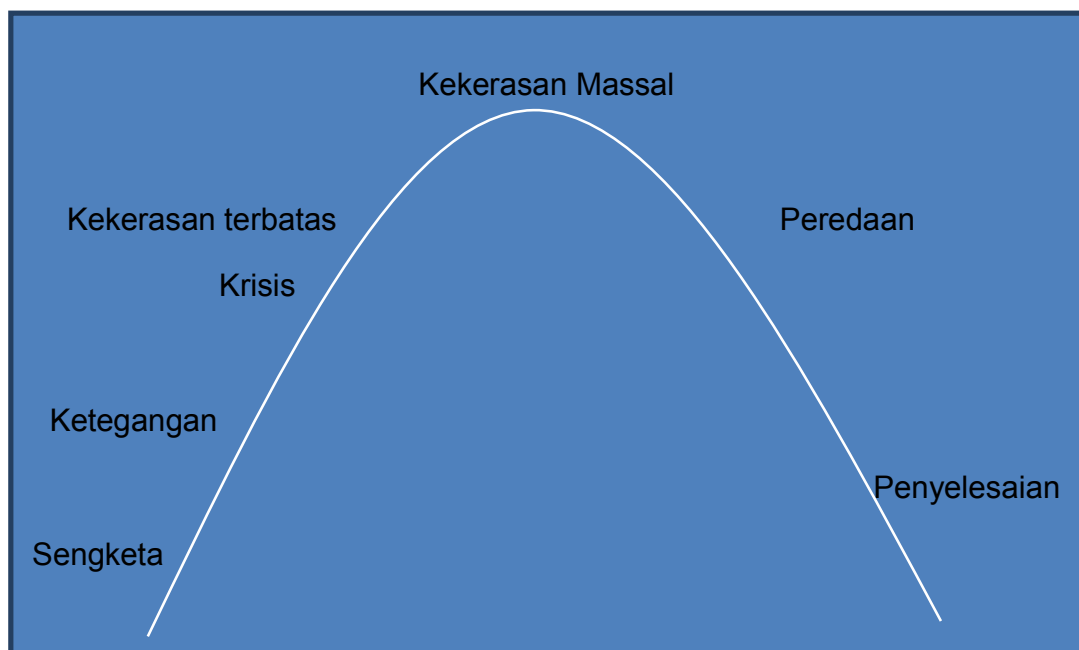
Konflik tawuran antar geng yang terjadi di Johar Baru ini termasuk ke dalam Konflik yang bersumber dari hubungan sosial psikologis. Karena konflik tawuran yang terjadi di Johar Baru ini sebagian besar muncul karena adanya pertentangan antar kelompok yang berawal dari prasangka, diskriminasi, dan sebab-sebab lainnya yang berasal dari dalam diri (psikologis) individu pelaku konflik tersebut. Konflik ini dipengaruhi pola-pola emosi kepribadian dan budaya. Reaksi-reaksi psikologis (melamun, melawan, dingin/diam) memegang peranan yang sangat kuat dalam mempengaruhi proses konflik. Konflik mengikuti gaya kepribadian dan psikologi seseorang.

Pada umumnya, setiap interaksi antar individu akan selalu memunculkan persepsi tentang pribadi individu lain. Namun, untuk individu yang termasuk ke dalam sebuah entitas kelompok tertentu, akan cenderung memiliki bias persepsi terhadap individu lain yang tergabung di dalam kelompok selain kelompoknya. Hal inilah yang terjadi di Johar Baru. Bias persepsi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik/tawuran antar geng. Ada prasangka yang timbul kepada anggota geng

lain yang menyebabkan rentannya kelompok-kelompok di Johar Baru dalam terjadinya konflik.

Menurut Ichsan Malik, konflik yang terjadi antar komunitas diibaratkan seperti kebakaran hutan, yang terjadi karena adanya tiga unsur, yaitu rumput kering sebagai factor struktural, api sebagai pemicu, dan angin sebagai akselerator. Hal ini berarti, meskipun api yang membakar kecil, tapi karena kondisi rumput yang sudah kering ditambah dengan angin yang kencang maka akan memberikan Sama seperti kondisi Johar Baru dimana kondisi kemiskinan dan padat penduduk sebagai factor structural, dan ada banyak hal yang menjadi pemicu dan akseleratornya. Oleh sebab itu konflik di wilayah ini sulit untuk dihentikan.

Tabel Kronologi Konflik dari Segi Waktu dan Ruang



Sumber: Ichsan Malik, 2006 "Asumsi Dasar, Sumber Konflik dan Resolusi Konflik" (telah diolah kembali oleh peneliti)

Berdasarkan table kronologi konflik tersebut, kondisi di wilayah Johar Baru setelah sampai pada tahap peredaan setelah kekerasan massal, belum diakhir dengan langkah penyelesaian. Langkah dan upaya penyelesaian yang diperlukan tidak hanya dengan memisahkan dan mendamaikan kelompok yang berkonflik, namun dibutuhkan upaya penyelesaian hingga sumber dan akar dari konflik, yaitu faktor kemiskinan dan lingkungan.

Konflik yang terus menerus terjadi dapat meningkatkan skala kerusakan di lingkungan sekitarnya. Jika tidak segera diatasi, maka konflik dapat menjadi lebih desktruktif dan memakan korban baik dalam bentuk materiil maupun individu. Oleh karena itu dibutuhkan upaya resolusi konflik. Upaya tersebut dilakukan dengan metode *peacemaking*, langkah ini dilakukan dengan mengatasi kekerasan episodic agar mencapai perjanjian damai dari pihak-pihak yang berkonflik. Setelah *peacemaking* berhasil dilaksanakan, maka kemudian dilanjutkan dengan *peacebuilding*. *Peacebuilding* merupakan upaya lanjutan untuk menghentikan kekerasan secara structural dan budaya. Hal ini melibatkan segala dimensi, mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Johar Baru sebagai kawasan yang berada di daerah Jakarta Pusat merupakan wilayah padat penduduk yang menjadi sangat rawan jika konflik sosial tersebut terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena konflik ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan aktifitas masyarakat lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya dalam mengatasinya. Upaya ini dilakukan hendaknya oleh instansi-instansi pemerintahan dan masyarakat yang terkait. Upaya *peacemaking* dan *peacebuilding* tidak akan berlangsung dan optimal jika tidak dilaksanakan secara terintegrasi.

Kondisi konflik di wilayah Johar Baru termasuk kedalam kondisi konflik massal situasi abnormal. Kondisi ini dapat diatasi dengan strategi menangani konflik berikut:

Tabel Strategi Penanganan Konflik

		STATIS	TIDAK STABIL	DINAMIS
		Kekuatan/ Kapasitas	Seimbang	
Tidak Seimbang	1. Pendidikan/W orkshop kritis Konflik yang tersembunyi		2. Hadapi Masalah (konsolidasi) Konflik yang terbuka	
		RENDAH		TINGGI
		KESADARAN KONFLIK/KERENTANAN		

Sumber: Ichsan Malik, 2006 "Asumsi Dasar, Sumber Konflik dan Resolusi Konflik" (telah diolah kembali oleh peneliti)

Konflik Johar Baru sebagai konflik yang tergolong abnormal membutuhkan strategi yang diawali dengan mengidentifikasi kekuatan atau kapasitas. Konflik abnormal memiliki kekuatan dan kapasitas yang tidak berimbang dengan kondisi yang statis. Hal ini dapat dilaksanakan strategi yang dimulai dengan pemberian pendidikan atau workshop untuk mengatasi konflik yang tersembunyi. Kemudian dilanjutkan dengan menghadapi orang-orang yang memiliki masalah untuk melakukan konsolidasi terhadap potensi konflik terbuka sehingga dapat dilakukan negosiasi untuk mencapai perdamaian.

4.3.2 Analisis Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penyelesaian dan Pencegahan Konflik di Kecamatan Johar Baru

Konflik yang terjadi di wilayah Johar Baru merupakan tanggung jawab dari pemerintah setempat. Hal ini disebabkan karena konflik yang terjadi disebabkan karena kondisi masyarakat yang tidak terurus. Oleh karena itu diperlukan pemerintah yang bekerja sesuai dengan perannya. Di dalam teori peran, peran diartikan sebagaii serangkaian perilaku tertentu yang dituntut dari suatu jabatan atau profesi tertentu.

Analisa terhadap peran dari pemerintah dapat dilihat dari tiga syarat-syarat peran tersebut, yaitu:

1. Peran harus meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Peran pemerintah ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Guna menjalankan peran pemerintah maka pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015. Peraturan ini menyatakan pelaksanaan terhadap Undang-Undang tersebut. Peraturan ini mengatur langkah dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap pencegahan, tindakan darurat penyelamatan dan memberikan perlindungan terhadap korban, antuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pasca konflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik serta monitoring dan evaluasi.⁶¹

⁶¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "PEerintah Terbitkan Aturan Penanganan Konflik Sosial", 12 Februari 2015 (<https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-aturan-penanganan-konflik-sosial/>) (diakses pada 3 Maret 2019)

Peraturan tersebut berisi 99 pasal yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pencegahan konflik yang dilakukan dengan menjaga kondisi damai masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun system peringatan dini.⁶²

Pasal 7 ayat 1 dan 2 dari peraturan tersebut menyatakan

“Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan konflik mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat, dan dapat melibatkan peran serta masyarakat”⁶³

Peraturan ini juga mengatur tindakan darurat yang perlu diambil dalam penyelamatan dan perlindungan korban dengan tujuan untuk; meminimalisir korban, memberikan rasa mana, menghilangkan trauma dan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban. Pemerintah daerah juga harus siap dalam memberikan tindakan darurat terhadap korban diantaranya yaitu; penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak dan orang-orang berkebutuhan khusus, perlindungan terhadap kelompok rentan, sterilisasi tempat yang rawan konflik, penegakan hukum dan penyelamatan harta benda korban.⁶⁴

Dengan adanya peraturan pemerintah ini, pemerintah daerah harus mengubah pandangannya dalam penanganan konflik. Jika dulu pemerintah daerah cenderung melakukan tindakan yang bersifat reaktif dan tidak terintegrasi, kini sudah saatnya untuk menjalankan upaya tersebut secara bersama-sama. Dalam hal ini pemerintah

⁶² *ibid*

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Mengenai Penanganan Konflik Sosial.

⁶⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Op., Cit

berperan merangkul berbagai instansi dan kalangan yang terkait, seperti kepolisian, TNI dan terutama masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan saran dari masing-masing pihak terkait yang memiliki sudut pandang dan pemahaman yang berbeda-beda, karena dalam menangani suatu konflik sosial harus dilihat dari berbagai aspek. Selain itu, pihak-pihak tersebut merupakan orang-orang yang benar-benar memahami kondisi konflik sebenarnya karena kontak langsung dengan konflik tersebut.

2. Peran harus sesuai dengan konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Peran dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Peran secara struktur organisasi berarti pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat bertanggungjawab dalam menjaga kerukunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat meliputi banyak aspek, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, hingga pendidikan. Masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhannya ini dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungannya. Dampak negatif ini memberikan potensi mudahnya muncul gesekan antar warga. Warga yang tidak terpenuhi kebutuhan hariannya akan cenderung memiliki tingkat emosi yang tinggi, terlebih lagi jika memiliki banyak waktu luang satu sama lain. Dalam hal ini pemerintah dalam struktur sosial di dalam masyarakat merupakan organisasi yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mencari solusi.

3. Peran merupakan sebuah rangkaian yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau profesi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok ini akan terjadi interaksi antara anggota dari suatu

kelompok masyarakat dengan anggota dari kelompok masyarakat lainnya. Dalam interaksi ini kemudian memunculkan ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat muncullah apa yang dinamakan dengan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang yang bersangkutan telah menjalankan suatu peranan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian dan pencegahan konflik antarwarga yang sering terulang di Kecamatan Johar Baru. Keadaan wilayah Kecamatan Johar Baru yang memang sudah lama terkenal sebagai “medan tawuran” dan tidak kunjung berhentinya aksi konflik antarwarga di wilayah tersebut, membuat Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada saat itu mengeluarkan Instruksi Gubernur terkait Kecamatan Johar Baru.⁶⁵ Kasubbid Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta menyatakan, Instruksi Gubernur Basuki Tjahja Purnama mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta karena permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru tidak kunjung berhenti dan selalu terulang.⁶⁶ Instruksi Gubernur ini bertujuan untuk mencapai percepatan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Johar Baru agar tercapai kesejahteraannya melalui penyelesaian masalah sosial di Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Poin pertama dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 65 Tahun 2016 ini berisikan rincian tugas yang diberikan kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah).

⁶⁵ Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Instruksi Gubernur ini dikeluarkan oleh Gubernur aktif pada saat itu, yaitu Basuki Tjahja Purnama.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sony, Kasubbid Penanganan Konflik Sosial, pada tanggal 13 Februari 2019.

Seluruh SKPD/UKPD yang disebutkan agar memberikan perhatian khusus sebagai tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan.⁶⁷ Kasubbid Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa Instruksi Gubernur ini bertujuan untuk mengajak seluruh unit yang ada untuk dapat bersama-sama dan saling berkoordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya demi mewujudkan kesejahteraan di Johar Baru. Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta sendiri dalam hal ini diberi tugas untuk mendukung segala bentuk kegiatan koordinasi organisasi kemasyarakatan. Selain itu, Kesbangpol juga diinstruksikan untuk mendukung dan memfasilitasi kebutuhan organisasi kemasyarakatan dalam rangka program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru. Kemudian untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta juga pernah mengadakan kegiatan seminar tentang Bela Negara kepada Siswa SMAN 27 Johar Baru di Ruang Pertemuan Hotel Sentral Rawasari Jakarta Pusat pada hari Rabu 14 November 2018. Kasubbid Ideologi Negara Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rachman menyebutkan bahwa Dialog Interaktif yang diadakan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran kepada para siswa mengenai Pentingnya Bela Negara. Pada penyampaian materi Dialog Interaktif ini, subbid Ideologi Negara mengundang Kepala Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, Direktur INFRA (*Indonesia for Transparency and Accountability*), serta Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya. Bapak Rachman menyatakan bahwa pihaknya berharap bahwa Dialog Interaktif ini dapat membangun karakter para siswa untuk berjiwa Pancasila dan lebih *aware* akan Bela Negara.

⁶⁷ Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2016

“Karena sebagian besar pelaku konflik merupakan anak-anak muda usia sekolah, oleh karena itu kita berharapnya kegiatan seperti ini bisa merubah pola pikir dan karakter mereka juga. Selain itu kita juga datangkan Kepala Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta karena tidak sedikit anak-anak muda yang ada di Johar Baru sudah mengkonsumsi Narkoba”⁶⁸

Sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.⁶⁹ Pembentukan FKDM di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKDM di tingkat Kecamatan mempunyai tugas untuk mencari, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data ataupun informasi yang didapat dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala, atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Kondisi konflik tawuran antarwarga yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru sudah seharusnya menjadi bukti penting adanya FKDM dan optimalisasi kinerja bersama para tokoh masyarakat di sana agar dapat mencegah terjadi kembali konflik tawuran antar warga di Kecamatan Johar Baru. Karena keanggotaan FKDM sendiri terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya yang seharusnya dapat meminimalisasi permasalahan tanpa harus berakhir pada terjadinya konflik.

⁶⁸ Wawancara bersama Kasubbid Ideologi Negara Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rachman pada 13 Februari 2019.

⁶⁹ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Upaya-upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah melalui Kecamatan adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Namun, Babinsa kelurahan Tanah Tinggi di Kecamatan Johar baru beranggapan bahwa bentuk sosialisasi yang diadakan oleh Kecamatan tidak memiliki dampak yang signifikan.

“Yaa sebenarnya sosialisasi-sosialisasi seperti itu tidak terlalu berguna sih, sudah dari dulu mereka melakukan sosialisasi tapi kenyataannya tawuran terus terulang. Masyarakat sini kalau saya tanya juga alasannya mau ikut sosialisasi cuma untuk dapat makan aja kok, ya mau bagaimana, orang di sini pada susah. Dan memang kalau dilihat kan memang akarnya ini karena faktor ekonomi.”⁷⁰

Bentuk upaya sosialisasi dan kegiatan sejenis yang telah diadakan sejak lama oleh Pemerintah melalui Kecamatan tidak berdampak dan kurang efektif karena tidak tepat sasaran. Kebanyakan masyarakat yang mengikuti acara tersebut hanya mengharapkan *snack* dan makan siang yang biasanya diberikan untuk masyarakat yang mengikuti sosialisasi. Upaya lainnya merupakan pelatihan-pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anak-anak muda di wilayah Kecamatan Johar Baru. Pelatihan-pelatihan yang difasilitasi Pemerintah Kota Jakarta Pusat biasanya berupa pelatihan mekanik, pelatihan mengemudi, pelatihan teknisi handphone, kursus komputer, dan lainnya. Namun, Ketua RW 14 Kelurahan Tanah Tinggi, Bapak Wahidin, menyatakan bahwa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ini tidak tepat sasaran. Beberapa alasannya adalah karena kebanyakan pelatihan dilakukan di tempat yang jauh dari wilayah Kecamatan Johar Baru dan akan mengharuskan mereka untuk mengeluarkan biaya transportasi, sedang kebanyakan warga yang ikut merupakan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bapak Wahidin mengatakan seringnya

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Achmad Marullah, Babinsa Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru pada 9 Januari 2019.

pelatihan keterampilan ini tidak memberikan biaya transportasi untuk warga yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan.

“Agak aneh aja sih, Mbak. Mereka (Pemerintah) mau ngasih pelatihan keterampilan untuk orang-orang yang nganggur, yang tidak ada pekerjaan, tentu tidak punya pemasukan. Sedang pelatihan yang diadakan selalu berada di tempat yang jauh seringnya tidak diberi uang transportasi, padahal seharusnya sudah ada di anggarannya. Ya namanya aja pengangguran gimana mau ke sana, mana jauh lagi, ujung-ujungnya kebanyakan yang sudah daftar itu paling cuma ikut satu-dua kali pertemuan, sesudahnya ya mereka males, padahal itu anggarannya pasti ada.”⁷¹

Untuk mengurangi konflik antarwarga yang terus berulang, pemerintah juga melakukan pemasangan CCTV di beberapa titik-titik rawan konflik tawuran. Namun sangat disayangkan, bahkan pihak Polsek Johar Baru sendiri mengalami kesulitan untuk mengakses CCTV ataupun rekamannya. Pengakuan dari Kapolsek Johar Baru, operator CCTV yang berada di kawasan yang cukup jauh (bukan di wilayah Kecamatan Johar Baru), dan rekaman CCTV yang tidak bisa tersimpan lama membuat pihak kepolisian sektor Johar Baru cukup kecewa di mana seharusnya mereka bisa mengakses/memantau secara langsung apabila ada kejadian atau aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, atau melalui Kecamatan, terbukti belum efektif karena pada tahun 2018 masih terjadi konflik antarwarga, yang berarti masih tersisa residu konflik yang suatu saat bisa memicu kembali terjadinya konflik tawuran antar warga. Upaya-upaya pemerintah hanya menghasilkan “*negative peace*”, karena damai dan aman

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Wahidin, Ketua RW 14 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru.

di wilayah Kecamatan Johar Baru hanya untuk jangka pendek dan bersifat sementara saja.

Di dalam teori peran yang dicetuskan oleh Kahn (2004) menjelaskan tentang sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai peran mereka. Jika sering terjadi perubahan terhadap lingkungan organisasi akan memunculkan rasa yang tidak aman. Harapan itu antara lain meliputi norma-norma atau tekanan-tekanan agar bertindak dalam cara dan kondisi tertentu. Tiap-tiap individu akan bertindak, menginterpretasikan, dan merespon dengan berbagai cara. Peran dari pemerintah harus tepat sasaran, dan menyentuh sampai ke akar penyebab konflik. Agar tercapainya "*positive peace*" di wilayah Kecamatan Johar Baru, agar konflik tawuran antarwarga di wilayah tersebut tidak terjadi kembali suatu saat nanti.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari temuan-temuan yang didapatkan di lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi di wilayah Kecamatan Johar Baru merupakan sebuah komplikasi permasalahan sosial-ekonomi dan lingkungan yang kurang sehat. Semua permasalahan tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat di wilayah tersebut. Dan hal ini menjadi faktor pemicu terjadinya konflik tawuran antarwarga yang kerap terulang di wilayah ini. Konflik tawuran ini menjadi wujud pelampiasan akan akumulasi tekanan yang didapat atas banyaknya masalah (seperti kurangnya pendidikan, kemiskinan, status pengangguran, permasalahan rumah tangga) sehingga menimbulkan perilaku mudah marah dan mudah terpancing emosinya. Ditambah lagi dengan kebiasaan kumpul-kumpul di jalanan sambil minum minuman keras yang menandakan rusaknya pergaulan anak-anak muda yang tinggal di wilayah Kecamatan Johar Baru.
2. Johar Baru sebagai kawasan yang berada di daerah Jakarta Pusat merupakan wilayah padat penduduk yang menjadi sangat rawan jika konflik sosial tersebut terus berlanjut. Hal ini disebabkan karena konflik ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan aktifitas masyarakat lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya dalam mengatasinya. Upaya ini dilakukan hendaknya oleh instansi-instansi pemerintahan dan masyarakat yang terkait. Upaya *peacemaking* dan *peacebuilding* tidak

akan berlangsung dan optimal jika tidak dilaksanakan secara terintegrasi.

3. Menurut teori, peran harus meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peran pemerintah ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan implementasi melalui Peraturan Pemerintah
4. Peran Pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Pusat masih belum tepat sasaran. Kurang optimalnya peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tawuran antarwarga di wilayah Kecamatan Johar Baru ini dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan hanya dapat menyelesaikan konflik dalam jangka pendek, dan masih meninggalkan kondisi *negative peace*, bukan *positive peace*. Pemerintah harus dapat mengurai satu persatu faktor penyebab konflik tawuran antarwarga yang terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru, dan menyelesaikan konflik sampai ke akarnya agar tercapai kondisi wilayah yang benar-benar damai.
5. Menurut Teori keamanan nasional, keamanan nasional pada saat ini tidak terbatas hanya pada pertahanan di perbatasan, tapi juga meliputi perlindungan kepada penduduk yang berada di luar negeri, menjamin akses ke aset yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan menjaga standar kehidupan, dan melindungi pemerintahan demi keberlangsungan negara. Konflik sosial yang terjadi di suatu daerah akan berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri, yang mana apabila tidak ditangani dengan segera dan secara keseluruhan, maka hal tersebut akan berdampak kepada stabilitas dan keamanan dalam negeri dan puncaknya akan mengancam keamanan nasional. Hal ini

juga berlaku untuk konflik sosial yang terjadi di Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat. Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia, yang dapat disebut sebagai miniatur dari Indonesia itu sendiri. Apabila konflik yang terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat ini tidak dapat ditanggulangi, maka akan menjadi gangguan keamanan dalam negeri yang dapat berdampak kepada keamanan nasional.

5.2 Rekomendasi

Peranan pemerintah di wilayah Kecamatan Johar Baru ini yang masih kurang optimal dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya dan menciptakan kondisi damai yang positif di wilayah ini, mengakibatkan masih terjadi kembali konflik di wilayah ini, dan masih tersisa residu konflik yang membuat wilayah Kecamatan Johar Baru ini menjadi rentan dan rawan konflik. Untuk dapat meningkatkan Perannya dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru, maka peneliti memberikan rekomendasi:

1. Relokasi warga Johar Baru ke tempat yang lebih layak atau pembangunan rusunawa agar tidak bersesakan. Pembangunan rusun dapat menjadi solusi pemecahan masalah kepadatan penduduk. Karena salah satu faktor penyebab konflik di wilayah Kecamatan ini adalah kepadatan penduduk yang begitu tinggi.
2. Membuat sekolah darurat atau sekolah gratis agar anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan pendidikan kembali. Tingkat pendidikan yang masih rendah merupakan faktor tingginya angka pengangguran di wilayah Kecamatan Johar Baru.
3. Untuk memfasilitasi anak-anak muda yang tinggal di Kecamatan Johar Baru (bukan hanya siswa sekolah, tapi termasuk anak-anak yang putus sekolah), dan diberi pelatihan Bela Negara untuk meningkatkan

jiwa nasionalisme, kesadaran, dan mengubah *mindset* dan perilaku mereka mengenai aksi kekerasan. Selain itu agar memberikan pelatihan-pelatihan pada warga Kecamatan Johar Baru di wilayah yang terjangkau oleh masyarakat. Agar masyarakat tidak kesulitan untuk menjangkau tempat pelatihan.

Penelitian mengenai peranan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru ini masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya yaitu narasumber yang kurang menyebar dan tidak begitu mencakup keseluruhan wilayah di Kecamatan Johar Baru. Peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru agar dapat melakukan pengumpulan data dengan subjek penelitian yang lebih menyebar pada tiap narasumber dan instansi di setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Johar Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, Abu. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2017. *Kecamatan Johar Baru dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta Pusat: BPS Jakarta Pusat.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2015. *Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta*. DKI Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta

Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

_____. 2007. *Training Manual Peace Building and Conflict Prevention*. Jakarta: Serap.

Mangum, Maruice, Aray Block Jr. 2018. *Social Science: Social Identity Theory and Public Opinions toward Immigration*.

Mashud, Mustain. 2015. *Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Pranadamedia Press.

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña. 1994. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. Sage Publications. United States of America.

Nugroho, Riant. 2014. *National Security Policy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Stoner, A.F. James. 1982. *Manajemen*. Jakarta: diterjemahkan Erlangga.

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.

Tadie, Jerome. 2009. *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. Depok: Masup Jakarta

Tajfel, Henri. 1982. *Social Psychology of Intergroup Relations, Annual Review*, dalam <http://web.comhem.se/u52239948/08/tajfel86.pdf> diakses pada 14 Agustus 2018.

Tesis

Utami, Dita Rahma. 2015. "Pencegahan Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat." *Tesis Magister*. Bogor: Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.

Jurnal

Aji, Dwi Sembodo. 2017. "Kontrol Sosial Keluarga dan Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Keterlibatan Pemuda dalam Tawuran Warga di Johar Baru, Jakarta Pusat." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* Vol.22, No.2: 159-184.

Darmajanti, Linda. 2012. *The Art of Violence: Arts Reconstruction of Violence Culture in Multicultural Community Urban Poor Jakarta*. Depok: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dharmawan, Arya Hadi. 2006. Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat). Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.

Gartiria Hutami & Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*

Mauliate, Abiram Benhard. 2014. "Wilayah Tawuran dan Wilayah Damai Tawuran Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat." *Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*. Depok: Universitas Indonesia.

Miller, W.B. 1982. *Crime by Youth Gangs and Groups in the United States. Report to The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, National Institute for Juvenile Justice and Delinquency Prevention*. Washington DC, US Department of Justice, dalam <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cyggus.pdf> diakses pada 3 Agustus 2018.

Rahardjo, Mudja. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.

Sumarno, Setyo. 2014. *Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru–Jakarta Pusat*. Jakarta, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52936-ID-problema-dan-resolusi-konflik-sosial-di.pdf> diakses pada 7 Agustus 2018.

Laporan

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2014. *Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) DKI Jakarta*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta

Badan Standardisasi Nasional. 2004. *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Bandung: BSN

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. *Data Pokok Kementrian Dalam Negeri Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT PENELITIAN

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN
Nomor : <i>Bi 2666 IX/2018</i> Klasifikasi : Biasa Lampiran : Satu Lembar Hal : Permohonan Izin Penelitian, Wawancara dan Permintaan Data.	Bogor, 29 Oktober 2018 Kepada : Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di Tempat	
<p>1. Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2017/2018. <p>2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya. b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Raesa Oktavia, NIM: 120170303022, Nomor HP: 081270009726, email: raesa.oktavia@kn.idu.ac.id bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga di Kecamatan Johor Baru." <p>3. Mohon konfirmasi waktu dan pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Contact Person: HP 081270009726 dan 08121020628 a.n. Raesa Oktavia.</p> <p>4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.</p>		
		<p>a.n. Rektor Universitas Pertahanan Waresak I Bid. Akademik dan Kermahasiswaan,</p>  <p>Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng Pembina Utama IV/e</p>
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur DKI Jakarta 2. Sekjen Kemhan 3. Rektor Unhan 4. Dekan FKN Unhan 5. Karo AK Unhan 		
<p>Kawasan IPBC Sentul Bogor, Telepon 021-29616766</p>		

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 266 /X/2018
Tanggal : 29 Oktober 2018

DAFTAR PEJABAT

1. Kepala Kesbangpol Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Kesbangpol Kota Jakarta Pusat
3. Kepolisian Sektor Johar Baru
4. Kodim 0501 Jakarta Pusat
5. Koramil 08 Johar Baru
6. Camat Johar Baru

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Mal Pelayanan Publik JL HR Rasuna Said Kav C 22 Telepon : 021-50810900
 JAKARTA Kode Pos : 12940

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 061/AF.1/31/-1.862.9/2019

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;
 6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai surat Warkel Bid Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertahanan Nomor 0/2666/X/2018 tanggal 17 Januari 2019;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Observasi, Wawancara, Studi Kasus, Studi Kepustakaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Raesa Oktavia
2. No. KTP : 1471116610910001
3. Alamat : Jl Sukajaya/Medang Bakar No 16 RT 004/008 Kel Labuh Baru Barat Kec Payung Sekaki, Pekanbaru
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Observasi, Wawancara, Studi Kasus, Studi Kepustakaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga di Kecamatan Johar Baru
- b. Tempat/Lokasi : Pemprov DKI Jakarta
- c. Bidang Penelitian : Damai dan Resolusi Konflik
- d. Waktu : Januari 2019 s.d Maret 2019
- e. Nama Lembaga : Universitas Pertahanan

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Rekomendasi Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jakarta, 29 Januari 2019
 a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA KESBANGPOL PROVINSI DKI JAKARTA

Narasumber :

Jabatan :

Tempat / Waktu wawancara :

P 1 : Dalam pandangan Kesbangpol apa faktor penyebab utama konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

P 2 : Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan koordinasinya dengan lembaga-lembaga di Jakarta Pusat dalam Penanganan Konflik Sosial di Johar Baru?

P 3 : Sudah adakah rekomendasi atau keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan konflik sosial di Johar Baru?

P 4 : Terkait potensi konflik antarwarga di Johar Baru, bagaimanakah upaya TTPKS Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah konflik terus terjadi?

P 5 : Sejauh ini bagaimana peran tokoh masyarakat dalam proses resolusi konflik antarwarga di Johar Baru?

P 6 : Apa saja upaya konkrit yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani dan mencegah konflik yang kerap terjadi di Johar Baru?

P 7 : Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mencegah konflik antarwarga terjadi di Johar Baru?

P 8 : Bagaimana pendekatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya konflik di Johar Baru?

P 9 : Sebenarnya, faktor apa yang membuat penyelesaian konflik antarwarga di Johar Baru tidak dapat benar-benar menghentikan konflik terjadi lagi di kemudian hari?

P 10 : Sebenarnya apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat konflik antarwarga di Johar Baru ini sebagai ancaman bagi keamanan nasional?

P 11 : Menurut anda, bagaimana langkah yang tepat untuk pencegahan konflik antarwarga yang kerap terjadi di Johar Baru?

P 12 : Adakah optimisme dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan dan pencegahan konflik di Johar Baru?

PEDOMAN WAWANCARA POLSEK JOHAR BARU

Narasumber :

Jabatan :

Tempat / Waktu wawancara :

P 1 : Menurut pihak kepolisian bagaimana kronologi awal terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru? Atau Bagaimana konflik antar warga di Johar Baru bermula?

P 2 : Seberapa sering terjadi konflik tawuran antar warga yang terjadi di Johar Baru?

P 3 : Bagaimana tindakan Polsek Johar Baru ketika terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

P 4 : Hingga saat ini apakah polisi secara khusus melakukan penjagaan di titik-titik yang menjadi tempat rawan terjadinya konflik antarwarga?

P 5 : Lalu bagaimana tindakan hukum bagi pelaku konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

P 6 : Bagaimana peran kepolisian dalam upaya penanggulangan konflik sosial di Kota Jakarta Pusat?

P 7 : Secara khusus apakah kepolisian juga turut terlibat dalam upaya rekonsiliasi kelompok warga yang berkonflik?

P 8 : Apakah kepolisian juga memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar konflik serupa tak terjadi ?

P 9 : Bagaimana langkah koordinasi Polsek dengan jajaran Kota Jakarta Pusat dalam upaya resolusi konflik antar kelompok warga yang berkonflik?

P 10 : Bagaimana pendekatan yang telah dilakukan oleh Polsek Johar Baru kepada tokoh masyarakat dalam upaya rekonsiliasi kelompok warga yang berkonflik?

P 11 : Sebenarnya apakah Polsek Johar Baru konflik antarwarga di Johar Baru ini sebagai ancaman bagi keamanan nasional?

P 12 : Adakah optimisme dari apakah Polsek Johar Baru terkait penyelesaian dan pencegahan terulangnya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru.

P 13 :Menurut anda, bagaimana langkah yang tepat untuk pencegahan konflik antarwarga yang kerap terjadi di Johar Baru?

PEDOMAN WAWANCARA KORAMIL 08/JOHAR BARU

Narasumber :

Jabatan :

Tempat / Waktu wawancara :

P 1 : Menurut pihak Koramil, bagaimana kronologi awal terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru? Atau Bagaimana konflik antar warga di Johar Baru bermula?

P 2 : Seberapa sering terjadi konflik tawuran antar warga yang terjadi di Johar Baru?

P 3 : Bagaimana tindakan dari Koramil 08/Johar Baru ketika terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

P 3 : Hingga saat ini apakah TNI secara khusus melakukan penjagaan di titik-titik yang menjadi tempat rawan terjadinya konflik antarwarga?

P 5 : Bagaimana peran TNI dalam upaya penanggulangan konflik sosial di Kecamatan Johar Baru?

P 6 : Secara khusus apakah Koramil 08 juga turut terlibat dalam upaya rekonsiliasi kelompok warga yang berkonflik?

P 7 : Apakah dari pihak Koramil 08 juga memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar konflik serupa tak terjadi?

P 8 : Bagaimana langkah koordinasi Koramil dengan jajaran Kota Jakarta Pusat dalam upaya resolusi konflik antar kelompok warga yang berkonflik?

P 9 : Bagaimana pendekatan yang telah dilakukan oleh Koramil 08/Johar Baru kepada tokoh masyarakat dalam upaya rekonsiliasi kelompok warga yang berkonflik?

P 10 : Sebenarnya apakah Anda menganggap konflik antarwarga di Johar Baru ini sebagai ancaman bagi keamanan nasional?

P 11 : Adakah optimisme dari pihak Koramil 08/Johar Baru terkait penyelesaian dan pencegahan terulangnya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

P 12 :Menurut anda, bagaimana langkah yang tepat untuk pencegahan konflik antarwarga yang kerap terjadi di Johar Baru?

PEDOMAN WAWANCARA CAMAT JOHAR BARU

Narasumber :

Jabatan :

Tempat / Waktu wawancara :

P 1 : Menurut pihak Kecamatan, bagaimana kronologi awal terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru? Atau Bagaimana konflik antarwarga di Johar Baru bermula?

P 2 : Seberapa sering terjadi konflik tawuran antar warga yang terjadi di Johar Baru?

P 3 : Bagaimana tindakan dari pihak Kecamatan Johar Baru ketika terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

P 3 : Hingga saat ini apakah dari pihak Kecamatan (anggota Satpol PP) secara khusus melakukan penjagaan di titik-titik yang menjadi tempat rawan terjadinya konflik antarwarga?

P 5 : Bagaimana peran pihak Kecamatan dalam upaya penanggulangan konflik sosial di Kecamatan Johar Baru?

P 6 : Secara khusus apakah Kecamatan juga turut terlibat dalam upaya rekonsiliasi kelompok warga yang berkonflik?

P 7 : Apakah dari pihak Kecamatan Johar Baru (Camat) memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar konflik serupa tak terjadi?

P 8 : Bagaimana langkah koordinasi Kecamatan (Camat) dengan jajaran Kota Jakarta Pusat dalam upaya resolusi konflik antar kelompok warga yang berkonflik?

P 9 : Bagaimana pendekatan yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Johar Baru kepada tokoh masyarakat dalam upaya rekonsiliasi kelompok warga yang berkonflik?

P 10 : Sebenarnya apakah Anda menganggap konflik antarwarga di Johar Baru ini sebagai ancaman bagi keamanan nasional?

P 11 : Adakah optimisme dari pihak Kecamatan Johar Baru terkait penyelesaian dan pencegahan terulangnya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

P 12 : Menurut anda, bagaimana langkah yang tepat untuk pencegahan konflik antarwarga yang kerap terjadi di Johar Baru?

LAMPIRAN 3. CATATAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kompol M Endy Mahandika, S.H
Jabatan : Kepala Polisi Sektor Johar Baru
Tempat/waktu Wawancara : POLSEK Johar Baru, 1 Februari 2019

Pertanyaan:

Bagaimana kronologi awal terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru? Atau bagaimana konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru bermula?

Saya (Kapolsek) baru dapat surat mutasi pada September 2018 dan baru mulai aktif (menempati pos) pada Oktober 2018, dan sejak saya di sini tidak pernah sampai terjadi tawuran antarwarga. Saya menggunakan konsep pencegahan, dengan adanya kejadian yang sudah-sudah saya pun menganalisa, bagaimana dan seperti apa terjadinya tawuran di Johar Baru ini. Sempat ada isu yang beredar bahwa tawuran yang terjadi merupakan situasi yang dibuat sebagai pengalihan transaksi narkoba di Johar Baru. Menurut saya, ini tidak benar dan tidak masuk akal. Karena di jaman sekarang ini, transaksi narkoba di wilayah Johar Baru bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan membuat keributan sebagai pengalihan. Sekarang ini yang marak adalah kenakalan remaja yang disebabkan oleh sosial media, yang sangat mudah digunakan untuk ejek-ejekan. Bahkan saya punya akun *fake* untuk masuk ke dalam grup mereka namun Alhamdulillah tidak ada sampai seperti *gangster* atau sebagainya.

Seberapa sering terjadi tawuran antarwarga yang terjadi di Kecamatan Johar Baru?

(Kapolsek baru menempati pos September 2018 dan baru mulai aktif Oktober 2018. Sejak Kapolsek menjabat, tidak ada konflik tawuran yang terjadi di Kecamatan Johar Baru. Data rekap konflik sudah didapat dari staff Kapolsek Johar Baru).

Bapak menyebutkan bahwa konflik sudah tidak terjadi lagi dalam waktu 7-8 bulan terakhir, faktor apa saja yang membuat konflik tidak lagi terjadi?

Kebetulan kami sudah mengikuti pelatihan di Singapura, yaitu *Crime Prevention Specialist*. Di sana kami belajar mengenai pentingnya pencegahan dini. Saya memaksimalkan pelatihan yang sudah saya dapatkan, dan saya terapkan di sini. Saya tidak mau kecolongan, jadi untuk anak-anak yang terdata pernah terlibat tawuran, kami datang ke rumahnya, kami jemput untuk dibina di Polsek Johar Baru. Meskipun anak-anak tersebut tidak lagi melakukan, tapi kalau belum pernah dibina maka tidak akan ada efek jera. Oleh karena itu, konsep yang kita lakukan adalah memberikan *shock therapy*, bukan di ruang tahanan, tapi di ruang pengamanan di Polsek. Anak-anak tersebut diinapkan 2-3 hari, kemudian diberikan himbauan, kemudian digunting rambutnya. Alhamdulillah para orang tua sangat mendukung, karena mereka merasakan ada perubahan pada anak-anak mereka.

Kemudian hal lainnya yang saya lakukan adalah patroli yang sifatnya membubarkan paksa mereka yang masih bergerombol di jalan. Karena ngumpul-ngumpul di jalan merupakan ajang mereka untuk menunggu 'lawan' atau mencari 'lawan'. Dan setelah saya pelajari ini tidak bisa dibiarkan.

Kemudian juga gerombolan anak-anak muda dari luar wilayah Johar Baru, seperti dari Kemayoran, Kalibaru, Poncol, Cikini, Menteng. Ketika mereka naik sepeda motor memasuki wilayah ini bergerombol, kita langsung tanya keperluannya apa dan kalau jawabannya tidak jelas kita langsung suruh pergi, karena bisa menimbulkan gesekan. Pernah terjadi ketika ada anak muda bergerombol dan ada yang berantem, *person to person*, itu temennya masih ngeliatin, ada yang melerai juga. Kemudian warga ngelaporin, dan tindakan yang kita lakukan adalah, yang masih tersisa di situ kita tangkep, yang sudah pergi (kabur) kita udah dapet infonya sekolahnya di mana. Kemudian kita hubungi gurunya, sampai kita dapat semua pelakunya untuk dibina di Polsek Johar Baru.

Bagaimana tindakan Kepolisian Johar Baru ketika terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

(Kapolsek baru menempati pos September 2018 dan baru mulai aktif Oktober 2018. Sejak Kapolsek menjabat, tidak ada konflik tawuran yang terjadi di Kecamatan Johar Baru. Data rekap konflik sudah didapat dari Bapak Abdul staff Kapolsek Johar Baru).

Hingga saat ini, apakah Polsek Johar Baru secara khusus melakukan penjagaan di titik-titik yang menjadi tempat rawan terjadinya konflik antarwarga?

Kita pernah mendapatkan informasi dari intel kami, bahwa beredar pesan di group whatsapp mereka bahwa setelah subuh mereka akan tawuran di salah satu titik. Kemudian saya datang ke titik yang mereka janjikan itu dan standby di sana. Pada saat itu, Polsek Johar Baru mendapatkan bantuan satu pleton BKO Direktorat Sabara Polda Metro Jaya yang diberdayakan untuk mengantisipasi tawuran. Antisipasi bisa sebelum atau pada saat kejadian, namun saya lebih ke sebelum kejadian. Akhirnya saya kumpulkan mereka, saya apelkan, saya tempatkan di pos RW Kota Paris. Di pos ini saya geser mereka ke salah satu titik yang dijanjikan oleh anak-anak muda ini. Setelah saya apel, kita tunggu. Kemudian salah satu anggota saya bertanya, “komandan, kita untuk apa di sini? Bukannya lebih baik kita sembunyi dulu kemudian kalau ada kejadian baru kita tangkap pelaku?” dan saya jawab, “Pak, itu salah. Kalau sudah seperti itu, dengan adanya kejadian, selain akan ada korban, kita juga akan capek. Lebih baik kita mencegah”.

Kebetulan kami sudah mengikuti pelatihan di Singapura, yaitu *Crime Prevention Specialist*. Di sana kami belajar mengenai pentingnya pencegahan dini. Saya memaksimalkan pelatihan yang sudah saya dapatkan, dan saya terapkan di sini. Saya tidak mau kecolongan, jadi untuk anak-anak yang terdata pernah terlibat tawuran, kami datangi rumahnya, kami jemput untuk dibina di Polsek Johar Baru. Meskipun anak-anak tersebut tidak lagi melakukan, tapi kalau belum pernah dibina maka tidak akan ada efek jera. Oleh karena itu, konsep yang kita lakukan adalah memberikan *shock therapy*, bukan di ruang tahanan, tapi di ruang pengamanan di Polsek. Anak-anak tersebut diinapkan 2-3 hari, kemudian diberikan himbauan, kemudian digunting rambutnya. Alhamdulillah para orang tua sangat mendukung, karena mereka merasakan ada perubahan pada anak-anak mereka.

Secara khusus, apakah Polsek Johar Baru juga turut terlibat dalam upaya rekonsiliasi kelompok warga yang berkonflik?

Untuk rekonsiliasi yaa, satu-dua hari setelah konflik terjadi kita datangi daerah lokasi tawuran, kita coba ngobrol sama warga menanyakan penyebab dan siapa yang menjadi provokator dalam tawuran yang sudah terjadi. Nah kesulitan di sini, seringnya tidak ada yang mau mengakui siapa yang memulai perkelahian, mereka berdalih bahwa mereka membela “temannya” dan wilayahnya.

Apakah dari Polsek juga memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar konflik serupa tidak terjadi?

Ya, tentu. Setiap rapat atau pertemuan bersama tiga pilar (Polsek, Koramil dan Camat Johar Baru) kita terus memberi masukan dan informasi terkait pencegahan konflik antarwarga di kecamatan Johar Baru. Kita juga ngga mau kecolongan terus.

Sebenarnya, apakah anda menganggap bahwa konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru ini sebagai ancaman bagi keamanan nasional?

Saya rasa kalau konflik terjadi kembali dan dengan intensitas yang tinggi dan tidak teratasi, tentu saja menjadi ancaman bagi Keamanan Nasional. Namun apabila masih menjadi konflik kecil yang bisa segera ditangani, ini belum menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

Menurut anda, bagaimana langkah yang tepat untuk pencegahan konflik antarwarga yang kerap terjadi di Kecamatan Johar Baru?

Menurut saya langkah yang tepat adalah pencegahan dini seperti yang telah saya lakukan sejak menjabat sebagai Kapolsek di Johar Baru. Karena dengan pencegahan serta pembinaan yang dilakukan terhadap anak-anak muda ini akan membuat efek jera kepada mereka. Membubarkan paksa anak-anak yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ngga jelas, yang kadang malah udah dalam kondisi mabuk, yaa mereka langsung kita bubarkan, kita suruh pulang.

Narasumber : Bapak Mayor Chb Endang Rahmat
Jabatan : Komandan Koramil 08 Johar Baru
Tempat/waktu Wawancara : Koramil 08 Johar Baru, 9 Januari 2019

Pertanyaan:

Bagaimana kronologi awal terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru? Atau bagaimana konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru bermula?

Tawuran/konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru ini sudah sangat sering sekali terjadi. Sejak tahun 1990-an ketika Kecamatan Johar Baru ini mulai padat penduduknya, sering terjadi gesekan antarwarga. Kepadatan penduduk yang semakin meninggi ini menjadi faktor utama penyebab konflik yang sangat kerap terjadi di Kecamatan Johar Baru. Padatnya penduduk namun terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana menjadi pemicu timbulnya konflik.

Ketika terjadi konflik antarwarga/kelompok warga, biasanya hanya diawali oleh permasalahan sepele. Seperti saling ejek mengejek antar warga, masalah wanita, rebutan tempat nongkrong, rebutan wilayah pasar, dll.

Terdapat juga indikasi bahwa tawuran yang terjadi merupakan kondisi yang sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian aparat atas transaksi narkoba yang sedang terjadi di tempat lain.

Seberapa sering terjadi tawuran antarwarga yang terjadi di Kecamatan Johar Baru?

Dalam 7-8 bulan terakhir sudah tidak ada terjadi konflik antar kelompok warga. Namun ketika konflik terjadi, tidak dapat diperkirakan intensitasnya. Terkadang bahkan bisa 2 kali sehari. Dan konflik pun terjadi tanpa mengenal waktu, tingkat kerawanan paling tinggi terdapat pada Malam Tahun Baru, Malam Idul Fitri, dan akhir pekan ketika banyak anak-anak muda kumpul-kumpul di jalanan atau gang di wilayah Johar Baru.

Bapak menyebutkan bahwa konflik sudah tidak terjadi lagi dalam waktu 7-8 bulan terakhir, faktor apa saja yang membuat konflik tidak lagi terjadi?

Sepertinya masyarakat Johar Baru juga sudah semakin memahami, siapa yang melakukan (memprovokasi konflik terjadi), dan juga mengenai modus pengalihan transaksi narkoba yang sedang terjadi. Kemudian juga seringnya patroli yang dilakukan oleh tiga pilar (TNI, Polisi, dan Kecamatan). Termasuk juga kan adanya unsur dari FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), ini adalah bagian dari pemerintah daerah, di bawah pembinaan Camat. Tugasnya adalah memonitor wilayah untuk membantu pemerintah daerah dan pihak aparat untuk memberikan informasi, melaporkan dan melakukan deteksi dan pencegahan dini terjadinya konflik di Kecamatan Johar Baru.

Bagaimana tindakan Koramil Johar Baru ketika terjadinya konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

Dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang), tugas TNI salah satunya adalah membantu kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang. TNI bertugas untuk mem-*back up* kepolisian, yang mana artinya apabila saat kepolisian tidak mampu untuk menangani konflik, maka meminta bantuan kepada TNI. Tetapi yang namanya kewilayahan, kami tidak berpatokan pada kalimat itu, tetapi kita sama-sama menangani begitu ada kejadian. Kita sama-sama ada di wilayah kejadian ketika konflik terjadi. Tetapi kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu kita terbentur pada perlengkapan, sedang polisi yang memang tugasnya memiliki alat (dalam hal ini senjata). Kalau kepolisian sebelum dan begitu ada kejadian, sudah dilengkapi dengan alat dan senjata, termasuk gas air mata. Kita (TNI) hanya menghalau dengan tangan kosong, dan memang itu resiko. Dan kita mau ngga mau harus ada di situ juga.

Hingga saat ini, apakah Koramil Johar Baru secara khusus melakukan penjagaan di titik-titik yang menjadi tempat rawan terjadinya konflik antarwarga?

Ya. Kami dari Koramil bersama-sama dengan Polsek Johar Baru dan Kecamatan secara rutin melakukan patrol di wilayah Johar Baru, termasuk juga di titik-titik rawan terjadinya konflik. Yang menjadi sasaran adalah anak-

anak muda yang lagi kumpul-kumpul. Jadi kalau ada yang kumpul-kumpul kita datengin, kita tanyain dan kita himbau untuk tidak kumpul-kumpul. karena dari pengalaman yang sudah ada, kebanyakan tawuran yang terjadi dikarenakan berawal dari adanya anak-anak muda yang sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan dan bisa terjadi gesekan dengan kelompok anak muda lainnya. Dan banyak anak-anak muda yang kumpul-kumpul biasanya dibarengi dengan minum-minum, dan jika sudah mabuk kan semakin rawan terjadinya perkelahian antar kelompok pemuda tadi.

Lalu bagaimana tindakan hukum bagi pelaku konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru?

Agak sulit mendapatkan/menangkap siapa yang menjadi provokator ketika tawuran pecah di lokasi. Jadi sampai-sampai, pihak Polsek itu sampai mengeluarkan sayembara, apabila ada yang dapat menginformasikan siapa sih pelaku tawuran itu, yang menjadi provokator, akan diberi hadiah. Karena memang agak sulit, ketika konflik terjadi, banyak orang di lokasi. Dan memang agak susah untuk menemukan siapa yang menjadi provokator terjadinya konflik antarwarga tersebut.

Bagaimana peran TNI dalam dalam upaya penanggulangan konflik sosial di Kota Jakarta Pusat?

Sebetulnya kan kita ini, untuk mengatasi supaya tidak terjadi lagi tawuran, secara intensif kita melakukan komsos (komunikasi sosial) setelah terjadinya konflik. Kita tiap hari Babinsa melakukan komsos (komunikasi sosial) dengan masyarakat, dengan para tokoh masyarakat, membahas tentang keamanan dan ketertiban. Juga mengajak para tokoh masyarakat untuk membantu memonitor wilayah kemudian mengajak masyarakat, menghimbau agar tidak melakukan tawuran. Itu langkah persuasif yang kita lakukan.

Secara khusus, apakah TNI juga turut terlibat dalam upaya rekonsiliasi kelompok warga yang berkonflik?

Sebetulnya kan kita ini, untuk mengatasi supaya tidak terjadi lagi tawuran, secara intensif kita melakukan komsos (komunikasi sosial) setelah terjadinya konflik. Kita tiap hari Babinsa melakukan komsos (komunikasi sosial) dengan masyarakat, dengan para tokoh masyarakat, membahas tentang keamanan

dan ketertiban. Juga mengajak para tokoh masyarakat untuk membantu memonitor wilayah kemudian mengajak masyarakat, menghimbau agar tidak melakukan tawuran. Itu langkah persuasif yang kita lakukan.

Apakah TNI/Koramil juga memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar konflik serupa tidak terjadi?

Udah sering ya, seperti komunikasi dengan Camat, dengan Satpol PP, komunikasi bagaimana mengatasi tawuran. Tapi hanya sebatas itu saja. Mungkin karena keterbatasan juga kali ya.. yang penting kita tetap melakukan tugas saja ya, apa yang bisa kita lakukan.

Sebenarnya, apakah anda menganggap bahwa konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru ini sebagai ancaman bagi keamanan nasional?

Ada yang bilang begini, Johar Baru ini merupakan barometer dari wilayah Jakarta Pusat. Kalau misalnya Johar Baru ini rusuh, maka bisa jadi akan timbul kerusuhan di wilayah lain. Kalau ancaman nasional, bisa jadi, iya. Kalau tidak segera diatasi, apabila tidak segera diselesaikan, karena berdampak kepada sistem keamanan dan ketertiban, sishankamrata. Kalau tidak segera diambil langkah-langkah yang signifikan.

Menurut anda, bagaimana langkah yang tepat untuk pencegahan konflik antarwarga yang kerap terjadi di Kecamatan Johar Baru?

Yaa paling tepat adalah, mengoptimalkan peran aparat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda.. mengoptimalkan peran-peran mereka serta sinergitas antara tiga pilar tadi (TNI, Polri, Kecamatan). Apabila kita patrol terus, tapi dari pihak pemerintah tidak ada membantu atau merespon, ya tetap saja tidak bisa.

LAMPIRAN 4. LAMPIRAN FOTO

Wawancara dengan Bapak Sony, Kasubbid Penanganan Konflik Sosial, Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 13 Februari 2019.



Wawancara dengan Koptol M. Endy Mahandika, S.H., Kepala Polisi Sektor Johar Baru di kantor Polsek Johar Baru, 1 February 2019



Wawancara bersama Danramil 08/Johar Baru
Bapak Mayor Chb Endang Rahmat, 9 Januari 2019



Wawancara dengan Kasie Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban,
Kecamatan Johar Baru, dengan Ibu Yanti Sri Hidayat. 31 Januari 2019



Wawancara dengan para Babinsa Koramil 08/Johar Baru,
pada 9 Januari 2019



Wawancara dengan Sugiarto, Ketua Karang Taruna Kelurahan Tanah Tinggi,
Kecamatan Johar Baru, pada 13 Januari 2019



Wawancara dengan Bapak Wahidin, Ketua RW 14 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru.

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Raesa Oktavia. Lahir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Anak keempat dari pasangan Bapak Darmawan dan Ibu Ertong Hayati. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada SDN 029 Pekanbaru, lulus pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Pekanbaru, lulus pada tahun 2006, pendidikan menengah atas ditempuh di SMA N 2 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2009. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Riau pada tahun 2015. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan program Magister di Universitas Pertahanan.